

BAB II
KONFLIK SURIAH 2011-2019 DAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN
PBB YANG DIUPAYAKAN DIDALAMNYA

2.1. Tipologi Konflik Suriah

Untuk menjelaskan tipologi Konflik Suriah berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Michael Brown, terlebih dahulu Penulis harus menjelaskan mengenai sejarah konflik ini. Konflik Suriah awalnya merupakan konflik internal yang berakar dari keberadaan Rezim Assad yang telah menduduki Suriah selama 49 tahun. Hal ini sesuai dengan premis bahwa setiap konflik internasional pasti bermula dari konflik internal (Brown, 1996: 8). Masa rezim Assad yang pertama merupakan pemerintahan Presiden Hafez Al-Assad yang berjalan dari tahun 1971 sampai tahun 2000 ketika beliau meninggal (Ciezdlo, 2013). Sedangkan rezim yang kedua merupakan pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad yang berjalan dari tahun 2000 sampai saat ini.

Pada awalnya, konstitusi Suriah menetapkan 40 tahun sebagai usia minimal bagi seseorang untuk menjadi presiden. Namun pada tahun 2000, Parlemen mengganti usia minimal tersebut menjadi 34 tahun, dimana saat itu Bashar Al-Assad memiliki usia yang sama (BBC, 11 Juni 2000). Parlemen pun mengajukan Presiden Bashar sebagai calon tunggal untuk menggantikan ayahnya. Melalui referendum yang dilaksanakan di Suriah pada tahun 2000, Presiden Bashar memperoleh dukungan sebanyak 97,26 % dari pemilih (Kifner, 2000), dilanjutkan dengan referendum yang serupa pada tahun 2007 beliau kembali terpilih menjadi Presiden Suriah dengan dukungan sebesar 97,6% (Washington Post, 28 Mei 2007), serta yang terakhir pada tahun 2014 Presiden Assad memenangkan pemilihan

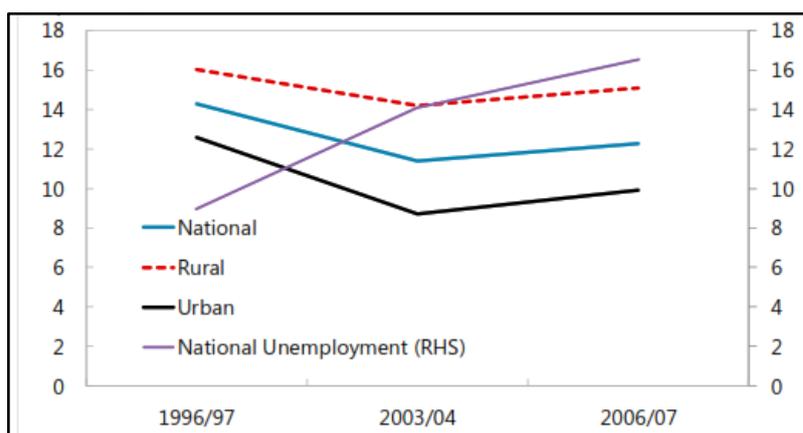
umum dengan perolehan suara sebesar 88,7% (Norris, 2015). Walaupun begitu, pengadaan pemilihan umum di situasi perang pada tahun 2014 dikritik keras oleh Sekretaris Jenderal PBB, yaitu Ban Ki Moon . Hasil pemilihan umum ini juga dianggap tidak sah oleh Amerika Serikat, *Gulf Cooperation Council* (GCC), dan Uni Eropa, dikarenakan peserta yang mengikuti pemilihan umum hanyalah sebanyak 27% dari warga negara Suriah yang sudah dapat menjadi Pemilih (NDTV, 5 Juni 2014).

Konflik Suriah awalnya merupakan konflik internal yang disebabkan oleh faktor struktur dan faktor sosial-ekonomi. Faktor struktur yang dimaksud adalah melemahnya peran negara dalam mengakomodasi hak-hak warga negaranya (Brown, 1996: 13). Sedangkan faktor sosial ekonomi yang dimaksud adalah persoalan ekonomi negara yang terjadi secara berkepanjangan dan kesenjangan sosial ekonomi yang tidak dapat terelakkan lagi di masyarakat (Brown, 1996: 18).

Keberadaan faktor struktur ditunjukkan dengan pembangian kekuasaan yang tidak seimbang di dalam internal pemerintahan rezim Assad (Heydemann, 2020: 153) dan penggunaan *Emergency Law* (1963) untuk menjaga kedaulatan (Menshawy, 2019: 4) pada hampir setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Suriah. Secara teknis, *Emergency Law* berisi peraturan-peraturan yang melegalkan Presiden untuk menggunakan kekerasan dalam menjaga keamanan dan kestabilan Negara (HRW, 2007). Namun pada kenyataannya, *Emergency Law* digunakan untuk menekan hak berserikat dan berpendapat warga negara Suriah, yaitu dengan melibatkan kekerasan dalam menghentikan demonstrasi dan kelompok politik yang dianggap mengancam posisi Presiden ketika menjabat.

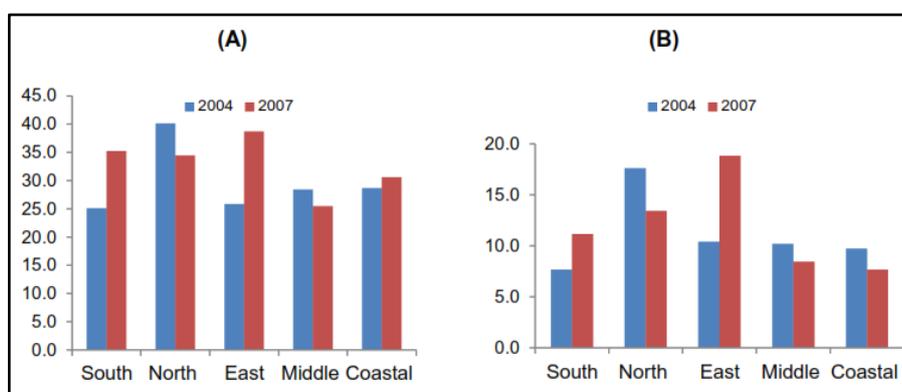
Penggunaan kekerasan dalam meredam opini rakyat merupakan manifestasi dari lemahnya negara dalam mengakomodir hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Penggunaan kekerasan tersebut juga merupakan cara Pemerintah Suriah untuk menutupi ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi yang dituntut oleh rakyat Suriah dalam perlawanan yang mereka lakukan. Keberadaan faktor sosial ekonomi terlihat pada substansi yang menjadi tuntutan para demonstran dan para kelompok kecil anti-pemerintah yang menerbitkan tulisan di surat kabar lokal, yaitu pengangguran dan kemiskinan, inflasi, serta pemerintahan yang korup (Oweis, 2011).

Grafik 2.1. Persentase Kemiskinan dan Pengangguran di Suriah



Sumber: UNDP, 2011

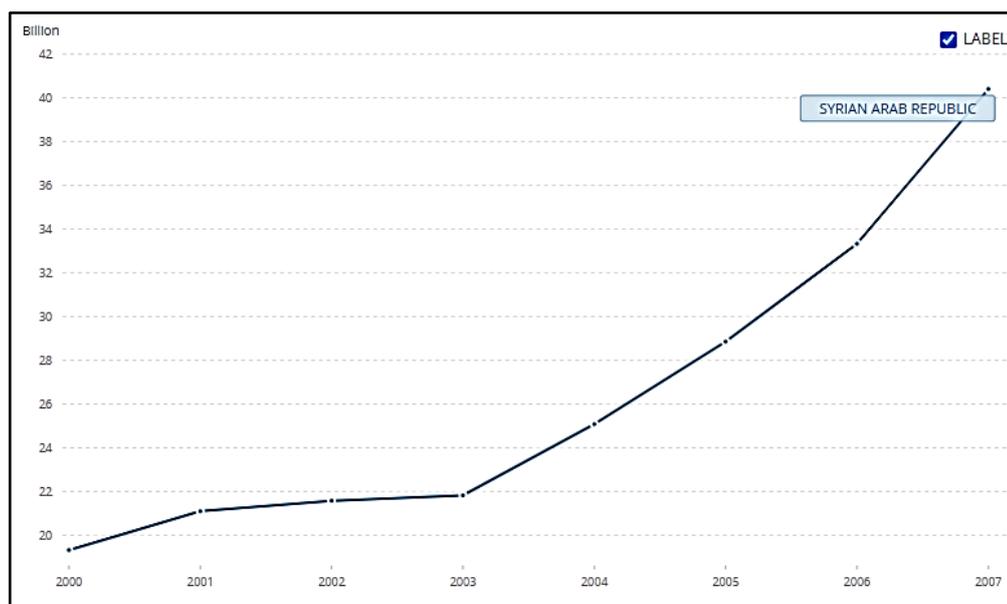
Grafik 2.2. [A] Upper Poverty Line dan [B] Lower Poverty Line di Suriah



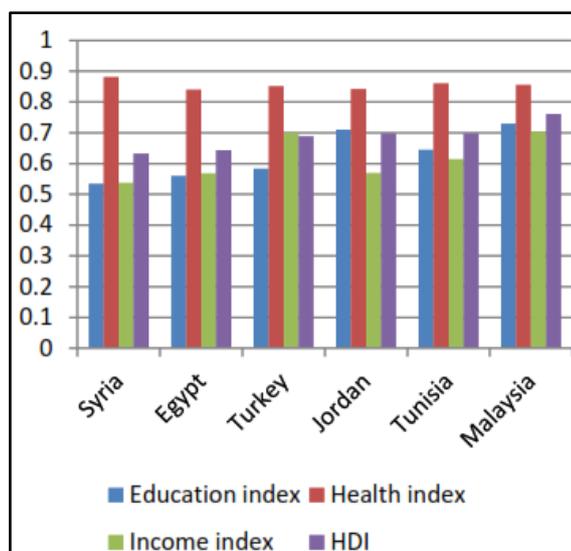
Sumber: Syrian Center for Policy Research, 2013

Angka kemiskinan di sebuah negara dapat dilihat melalui beberapa persepsi, salah satunya *Upper Poverty Line* (UPL) dan *Lower Poverty Line* (LPL) seperti yang tergambar pada Grafik 2.2. UPL merupakan persentase kemiskinan yang dihitung melalui belanja makanan dan kalori yang dikonsumsi dalam rumah tangga, sedangkan LPL menggunakan total belanja rumah tangga sebagai bilangan penghitungnya (Department of Statistics South Africa, 2019). Tahun 2007 merupakan pendataan terakhir mengenai kemiskinan sebelum Konflik Suriah terjadi. Bila menggunakan metode UPL penduduk miskin di Suriah naik dari 30,2% (2004) menjadi 33,6% (2007), sedangkan metode LPL menunjukkan persentase penduduk miskin yang naik dari 11,5% (2004) menjadi 12,3% (2007) (UNDP, 2011: 8). Metode UPL lebih tepat dalam mencerminkan kesenjangan dan krisis yang terjadi di Suriah, karena belanja makanan dan asupan kalori merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh UNDP, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Perekonomian, dan Indeks Pendidikan (UNDP).

Grafik 2.3. GDP Suriah 2000-2007 (USD 000.000.000)



Sumber: *World Bank*, 2020

Grafik 2.4. Persentase Terpakainya GDP untuk Anggaran IPM (2010)

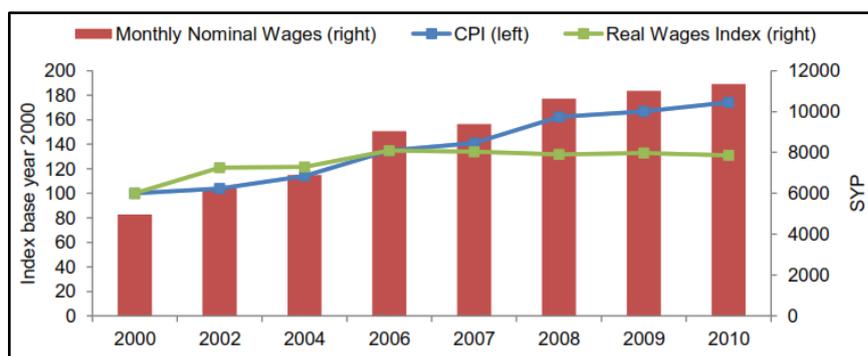
Sumber: *Syrian Center for Policy Research*, 2013

Suriah mendapat pujian dari *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank atas kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) mereka yang signifikan yaitu dari 22 miliar USD (2003) menjadi 40,5 miliar USD (2010) seperti yang terlihat pada Grafik 2.3. Namun menurut Grafik 2.4. hal tersebut tidak terlihat dalam pembangunan IPM di Suriah, tidak satupun anggaran indikator IPM memenuhi syarat minimal 2% dari GDP seperti yang ditentukan oleh UNDP (*Syrian Center for Policy Research*, 2013: 23).

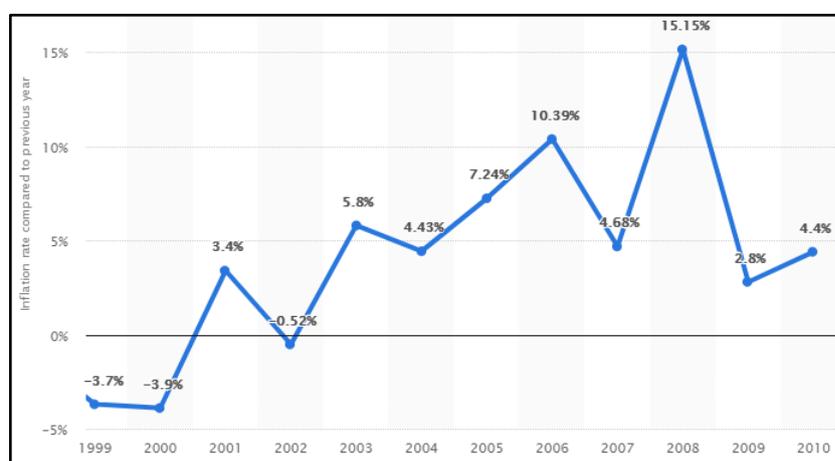
Grafik 2.5. Pengeluaran Belanja Rumah Tangga di Suriah

Governorate	2004 (current prices)	2009 (current prices)	2009 (in 2004 prices)	Real growth in expenditure (2004-2009)
Damascus	28377	42942	24001	-3.30%
R. Damascus	20114	34222	20646	0.50%
Homs	20770	31702	18961	-1.80%
Hama	21832	30549	19149	-2.60%
Tartous	23831	37161	24980	0.90%
Lattakia	20789	36419	23422	2.40%
Idleb	22014	26747	16986	-5.10%
Aleppo	18232	32170	18304	0.10%
Al-Raqqqa	21351	28527	17440	-4.00%
Deir Ezzor	23248	25696	13550	-10.20%
Al-Hasakeh	23931	30576	20386	-3.20%
Al-Sweida	17858	30661	21243	3.50%
Dara'a	25633	36748	18939	-5.90%
Al-Qunaitra	20791	34158	19818	-1.00%
Syria	21694	32755	19556	-2.10%

Sumber: *Syrian Center for Policy Research*, 2013

Grafik 2.6. Rata-rata Pendapatan per Kapita di Suriah

Sumber: *Syrian Center for Policy Research*, 2013

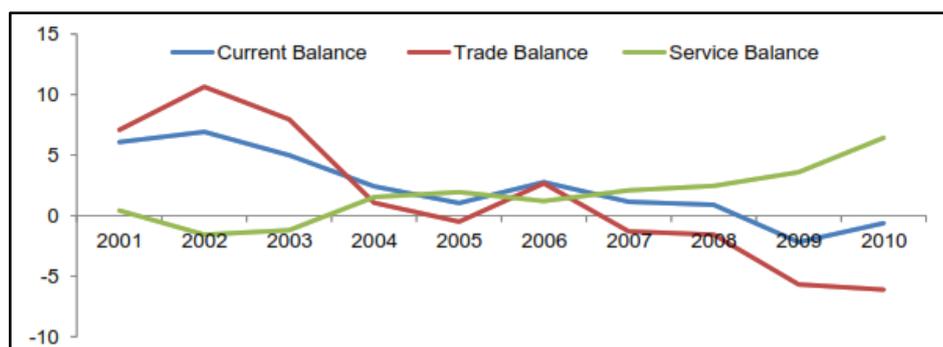
Grafik 2.7. Tingkat Inflasi di Suriah

Sumber: *Trading Economics*, 2019

Grafik 2.5. menunjukkan bahwa pada tahun 2009 hampir seluruh wilayah di Suriah mengalami penurunan pengeluaran rumah tangga dengan rata-rata penurunan sebesar -4,2%, selain itu rata-rata pendapatan per kapita di Suriah juga mengalami sedikit penurunan sejak 2006 seperti yang terlihat pada Grafik 2.6. Penurunan pengeluaran rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar dan pupuk, sistem harga pasar yang buruk, dan inflasi yang semakin parah sejak tahun 2007 (*Syrian Center for Policy Research*, 2013: 24). Dengan begitu, kemajuan GDP yang terjadi tidak mencerminkan kesejahteraan warga negara Suriah saat itu. Grafik 2.7.

kemudian menunjukkan bahwa Suriah mengalami kenaikan Inflasi sebesar 9% dari tahun 2007-2008. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2008 pemerintah menghapuskan *fixed rate* untuk tambang minyak bumi di Suriah dan menggunakan *floating rate* untuk membiarkan perusahaan penambang swasta menentukan harga di pasar (Syrian Center for Policy Research, 2013: 22-26).

Grafik 2.8. Persentase Neraca Perekonomian terhadap GDP di Suriah



Sumber: Syrian Center for Policy Research, 2013

Grafik 2.9. Persentase Partisipasi Kerja di Suriah

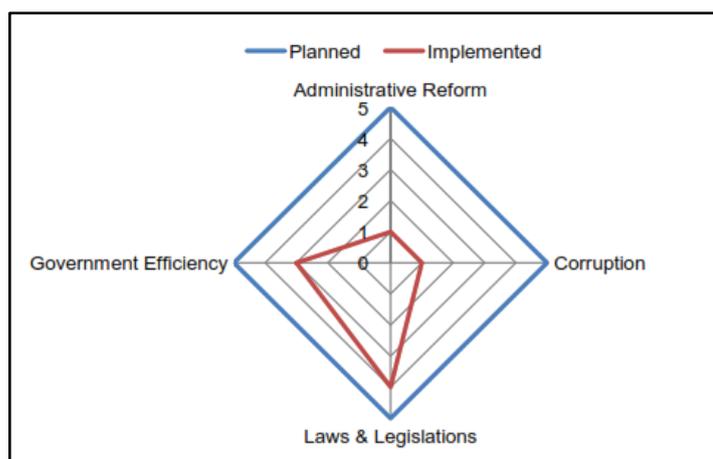
	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Male	81.3	80.1	76.3	72.8	74.1	74.0	72.5	71.7	72.2
Female	21.3	23.2	19.0	14.5	14.9	14.4	14.6	13.0	12.9
Urban	48.5	47.5	45.7	43.7	45.2	43.9	43.8	43.3	43.0
Rural	56.4	58.0	50.7	46.5	46.4	46.0	44.2	42.7	42.4
Total	52.3	52.5	48.0	44.9	45.8	44.9	44.0	43.0	42.7

Sumber: Syrian Center for Policy Research, 2013

Neraca perekonomian Suriah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2006-2010 seperti yang terlihat pada Grafik 2.8. Neraca jasa mengalami stagnasi dari 3-5% (2006-2010), neraca dagang yang dahulu menyumbang 4% terhadap GDP (2006) menjadi defisit -5% terhadap GDP (2010), Begitu pula dengan neraca pendapatan yang dahulu menyumbang 4% terhadap GDP (2006) menurun sampai 0% (2010) dan tidak berkontribusi terhadap GDP. Penurunan

neraca pendapatan Suriah disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak kompetitif dan jumlah impor yang naik drastis bersamaan dengan ekspor minyak Suriah mengalami penurunan yang drastis pula (Syrian Center for Policy Research, 2013: 14). Penurunan tersebut sejalan dengan tingkat partisipasi kerja Suriah yang terus menurun dari tahun 2000-2010 seperti yang terlihat pada Grafik 2.9. dengan partisipasi terakhir hanya sebesar 42.7% (2010). Di sisi lain, Suriah telah membangun 400.000 lapangan pekerja baru semenjak satu dekade terakhir, namun angka partisipasi kerja di atas menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Suriah gagal menyerap angkatan kerja yang baru secara inklusif setiap tahun nya (Syrian Center for Policy Research, 2013: 20).

Grafik 2.10. Evaluasi Program Reformasi Pemerintah Suriah Tahun 2009



Sumber: *Syrian Center for Policy Research, 2013*

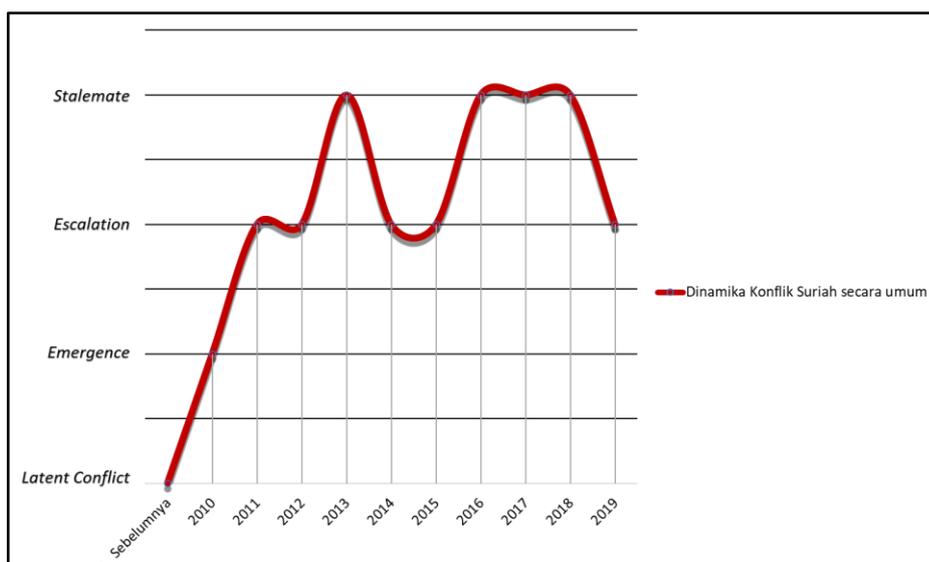
Berdasarkan Grafik 2.10. di atas, evaluasi program kerja lima tahunan tahun 2009 menunjukkan hampir tidak ada kemajuan mengenai penanganan kasus korupsi dan perbaikan administrasi pemerintahan di Suriah. Adapun permasalahan pada administrasi pemerintahan adalah anggaran belanja negara yang tidak tepat sasaran, sistem pengadilan dan hukum yang berbelit, fasilitas publik yang buruk,

dan proses pembuatan kebijakan yang tidak transparan (Syrian Center for Policy Research, 2013: 30-31).

2.2. Dinamika Konflik Suriah

Konflik Suriah merupakan konflik dengan dinamika yang fluktuatif, dimana jumlah aktor dan kepentingan yang begitu banyak dalam konflik ini menjadi penyebab fluktuasi tersebut. Kehadiran aktor baru dalam Konflik Suriah biasanya membawa kepentingan yang baru pula, yang menyebabkan Konflik Suriah memiliki kontradiksi yang baru. Kontradiksi yang baru biasanya menghasilkan babak yang baru pula dalam Konflik Suriah.

Grafik 2.11. Dinamika Konflik Suriah secara umum



Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber

Bila dibandingkan dengan Grafik Dinamika Konflik oleh Peter Wallensteen, Konflik Suriah memiliki grafik yang tidak lazim. Seperti yang terlihat pada Grafik 2.11. konflik ini hanya bergerak dari tahap *Emergence* sampai *Stalemate*. Konflik ini tidak pernah mencapai tahap *De-escalation* meski berbagai pihak termasuk Dewan Keamanan PBB telah berusaha mengagendakan perdamaian

di sana. Dalam bagian ini, Penulis akan menggambarkan setiap babak dalam Konflik Suriah menjadi Grafik Dinamika Konflik Wallensteen. Penggambaran tersebut didasarkan pada urutan kejadian yang Penulis bagi ke dalam periode tahunan. Tujuan utama dari keberadaan grafik-grafik di bawah adalah untuk menggambarkan peran Dewan Keamanan PBB yang tidak signifikan dalam menurunkan tensi pada Konflik Suriah, apalagi membawanya menuju tahap perdamaian.

2.2.1. 2011: Dorongan Musim Semi Arab

Usaha nyata untuk bangkit dari otoritarianisme Assad dimulai pada tahun 2011, bersamaan dengan fenomena Musim Semi Arab yang terjadi di Timur Tengah. Musim Semi Arab bermula di Tunisia dan fenomena tersebut berhasil menggulingkan Presiden Ben Ali pada akhir tahun 2010 (Aljazeera, 4 Desember 2017) dan berdasarkan urutan kejadian yang tertulis di bawah, secara umum tahun 2011 merupakan tahap *Escalation* dari Konflik Suriah, dimana tahap *Emergence* nya merupakan tuntutan para demonstran yang sudah terjadi sejak sebelum tahun 2011.

Pada awal bulan Mei 2011, Presiden Assad berjanji akan mengabdikan permintaan para demonstran dengan melakukan upaya perdamaian, membebaskan para tahanan politik, turun dari rezim yang ada, dan mencabut *Emergency Law* (News Wires, 20 April 2011). Namun nyatanya, Presiden malah mengerahkan *tank* dan pasukan bersenjata ke Kota Deraa, Banyas, Homs, dan beberapa daerah di Damaskus untuk meredam keberadaan para demonstran. Keadaan tersebut menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi kepada Suriah. Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan berbagai pinjaman dan

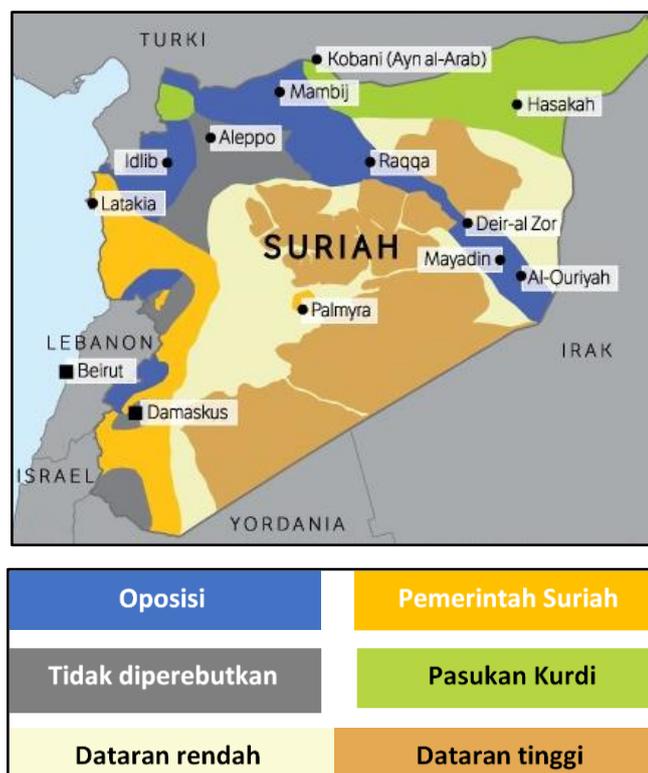
proyek yang dilaksanakan di Suriah (Mohammed, 2011), dan Uni Eropa memutuskan mencabut izin impor minyak dari Suriah di seluruh wilayahnya (BBC, 23 Mei 2011). Ditambah lagi, Liga Arab memutuskan untuk menanggukkan keanggotaan Suriah akibat krisis yang terjadi (Aljazeera, 28 November 2011). Uni Eropa dan Liga Arab memang selalu memihak ke Amerika Serikat dalam fenomena Musim Semi Arab (Harders & Jünemann, 2017).

Pada Juni 2011, pengawas dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*) melaporkan Suriah ke Dewan Keamanan PBB atas dugaan bahwa Suriah sedang membangun reaktor nuklir rahasia yang akan digunakan untuk menghentikan para demonstran (Crail, 2011). Pada bulan itu pula, para kelompok anti pemerintah kembali melakukan demonstrasi namun kali ini dengan menggunakan senjata dan unit-unit militer, terutama di Provinsi Hama. Demonstrasi tersebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Arab Saudi, dan Turki (Ali, 2011). Merespon keadaan yang terjadi, pada Juli 2011 Presiden Assad memecat gubernur Hama (VOA, 1 Juli 2011) dan mengerahkan pasukan bersenjata untuk menertibkan para demonstran. Pasukan tersebut diperkirakan menewaskan 100 jiwa (Black, 2011).

Pada akhir September 2011, para kelompok yang merupakan oposisi pemerintah bergabung membentuk sebuah koalisi yang dinamakan Dewan Nasional Suriah. Dewan tersebut terdiri dari 120 orang anggota yang terdiri dari aktivis, pengusaha, dan pejabat militer (Yezdani, 2011). Koalisi ini didukung oleh sebuah kelompok aktivis dari Britania Raya yang bernama *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR). Saat itu, agenda utama Dewan Nasional Suriah dan SOHR adalah untuk melaporkan kematian demonstran yang terjadi akibat tindakan represif

pemerintah setiap harinya (Ghribi, 2011). Koalisi ini diakui oleh beberapa negara, yaitu Perancis (Rettman, 2011), Amerika Serikat (Labott, 2011), Britania Raya (Tovrov, 2012), dan Libya (Khaleej Times, 12 Oktober 2011).

Gambar 2.1. Peta Kubu Demonstran di Suriah Tahun 2011

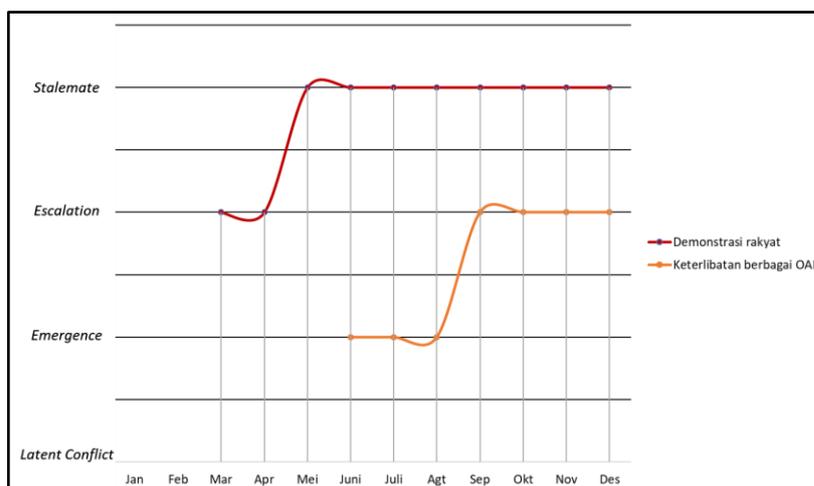


Sumber: BBC, 2012

Pada Maret 2011, gelombang demonstrasi pertama menyebar ke seluruh wilayah Suriah dengan Kota Deraa dan Kota Damaskus sebagai pusatnya. Demonstrasi di Damaskus merupakan massa yang pro terhadap rezim Assad (BBC, 15 Maret 2011), sedangkan demonstrasi di Kota Deraa berisi massa yang anti terhadap rezim Assad (Sterling, 2012). Terdapat pula gerakan Islam Sunni yang mendukung pemerintah dan Islam Syiah sebagai oposisinya (Lakitsch, 2018: 4). Namun gerakan Islam tersebut tidak menjadi masalah yang signifikan dalam konflik internal Suriah, melainkan struktur politik pemerintahan di sana (Khatib, 2019: 5). Para Demonstran menuntut tiga hal, yaitu: Membebaskan tahanan politik

yang sebenarnya tidak bersalah, menurunkan rezim pemerintahan yang ada, dan menghapuskan *Emergency Law* (Aljazeera, 4 April 2018). Saat itu, Pemerintah menanggapi demonstrasi Deraa dengan cara yang represif.

Grafik 2.12. Dinamika Konflik Suriah Tahun 2011



Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber

Pada November 2011, demonstrasi yang terbesar terjadi di Kota Idlib. Pasukan Presiden Assad mengerahkan senapan mesin untuk meredakan demonstrasi tersebut. Menurut SOHR, terdapat 100 orang lebih yang hilang ditangkap oleh pasukan Pemerintah dalam demonstrasi di Idlib (VOA, 20 Desember 2011). Mengetahui keadaan yang terjadi, Liga Arab pun melakukan diskors terhadap keanggotaan Suriah dengan alasan bahwa Suriah menodai cita-cita *Arab Peace Plan* (Aljazeera, 4 November 2011). Liga Arab mengimbau agar Pemerintah Suriah menghentikan penggunaan kekerasan dan menyarankan agar Suriah melakukan dialog nasional dengan berbagai pihak, dimana Liga Arab bersedia memfasilitasi dialog tersebut (BBC, 17 Oktober 2011). Merespon pernyataan Liga Arab, Ahmed Yousef sebagai duta besar Suriah untuk Liga Arab menolak untuk menerima saran di atas. Beliau mengatakan bahwa pernyataan Liga Arab merupakan tindakan yang memusuhi Suriah, mengganggu perdamaian di

tingkat kawasan, dan tidak memperbaiki keadaan yang terjadi. Karena pernyataan Ahmed Yousef di atas, pada akhir November 2011 Liga Arab mengumumkan bahwa mereka menjatuhkan sanksi kepada Suriah (Macfarquhar, 2011). Mereka juga mengumumkan bahwa selama enam bulan terakhir, Pemerintah telah menewaskan 6.500 orang dalam demonstrasi yang terjadi. Terdapat empat sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah, yaitu: Pemutusan seluruh transaksi kepada Bank Sentral Suriah, Penghentian pendanaan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk proyek di Suriah, Pelarangan bagi staf pemerintahan Suriah untuk bepergian ke negara anggota Liga Arab, dan pembekuan seluruh aset di negara Arab yang melibatkan Presiden Assad (BBC, 27 November 2011).

2.2.2. 2012-2013: Organisasi Islam Radikal dan Intervensi Amerika Serikat

Selama 2012-2013, Pemerintah maupun rakyat yang melakukan demonstrasi menggunakan kekerasan dalam menghadapi satu sama lain. Namun seperti yang terlihat pada Grafik 2.13, tahun 2012-2013 merupakan babak *Emergence* dalam Konflik Suriah karena tahun-tahun tersebut membawa berbagai isu baru, yaitu keterlibatan Al-Qaeda, Amerika Serikat, Hizbullah, Turki, dan terbentuknya *Free Syrian Army* (FSA).

Keterlibatan Al-Qaeda di Konflik Suriah sebenarnya sudah dimulai dari dua kasus bom bunuh diri yang terjadi pada Desember 2011 di Kota Damaskus dan Kota Idlib. Sebelumnya, kasus bom bunuh diri tersebut diduga berasal dari anggota *Jamaat Ansar Al-Sunna*, yaitu salah satu organisasi muslim Sunni di Suriah (Khan, 2012). Namun pada Februari 2012, Ketua Badan Intelijen Amerika Serikat yang bernama James E. Clapper mengungkapkan bahwa bom bunuh diri tersebut merupakan bom dari anggota Al-Qaeda (Washington Post, 16 Februari 2012). Temuan ini juga

berhasil mengetahui bahwa pengeboman yang ditujukan kepada pangkalan militer Pemerintah Suriah di Kota Damaskus selama Januari 2012 merupakan bom dari Al-Qaeda (Hussain, 2012). Karena itulah, Januari 2012 ditandai sebagai awal mula keterlibatan organisasi teroris di Konflik Suriah.

Al-Qaeda merupakan organisasi semi-militer yang berideologi Islam Sunni. Visi Al-Qaeda adalah untuk mengurangi pengaruh keduniawian terhadap keberadaan dan kepentingan agama Islam. Visi tersebut terwujud dalam salah satu misi Al-Qaeda untuk mendirikan negara kekhilafahan di Timur Tengah (Byman, 2015) dengan melibatkan diri dalam fenomena Musim Semi Arab. Di Timur Tengah, Al-Qaeda memilih Irak dan Suriah sebagai pusat kekhilafahannya, yang pada 2014 nanti menjadi cikal bakal berdirinya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Hal itu disebabkan karena Al-Qaeda tidak memiliki koneksi yang kuat untuk memengaruhi kaum pemberontak di beberapa negara lain yang juga terkena Musim Semi Arab, seperti Libya, Mesir, dan Tunisia (Fishman, 2007: 15).

Kuatnya koneksi Al-Qaeda di Suriah berhubungan dengan sosok Abu Musab Al-Zarqawi. Al-Zarqawi merupakan pendiri gerakan Islam Salafiyah dan Al-Qaeda di Irak (Wagemakers, 2018: 2-3), juga merupakan penggagas ide *Islamic State of Iraq* (ISI) yang sekarang diketuai oleh Abu Muhammad Al-Jaulani (Hassan, 2018). Dahulu, Al-Zarqawi bersama Osama bin Laden dan Ayman Al-Zawahiri merupakan sosok utama dalam Kaum Mujahidin di Afganistan saat perang dengan Uni Soviet berlangsung. Bahkan setelah Uni Soviet keluar dari Afganistan, Kaum Mujahidin tetap secara aktif bergerak sebagai organisasi Jihadis yang rutin merekrut militan baru (Ramana, 2013: 7). Al-Zarqawi bertugas untuk merekrut militan dari Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Militan tersebutlah

yang dipanggil kembali saat Konflik Suriah mulai bereskalasi, yaitu melalui pernyataan resmi ketua Al-Qaeda (Ayman Al-Zawahiri) pada Februari 2012 lalu yang memerintahkan seluruh anggota Al-Qaeda dari Iran, Lebanon, Yordania, dan Suriah (daerah *levant*) untuk wajib turut serta memerangi rezim Presiden Assad (Burke, 2012).

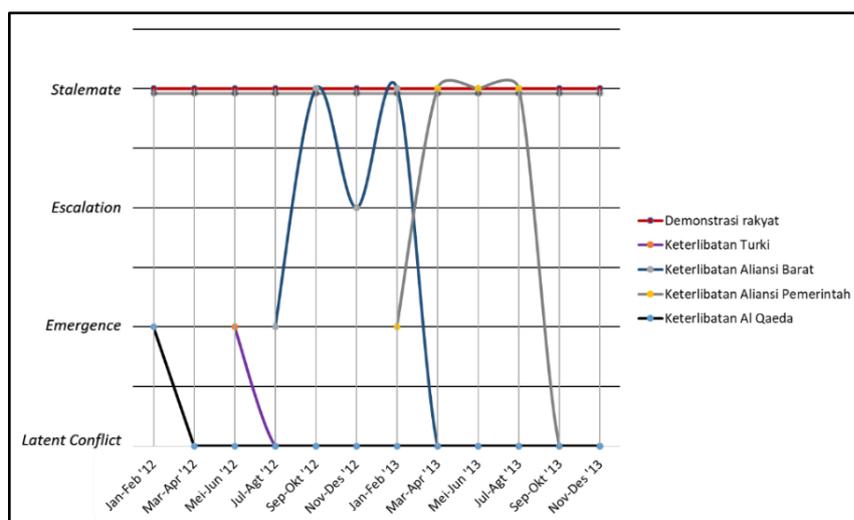
Al-Qaeda merupakan organisasi yang oportunis. Mereka memilih Suriah sebagai pusat kekhalifahannya disebabkan oleh dua hal, yaitu jaringan militan yang telah mereka bangun selama belasan tahun di sana dan posisi Suriah sebagai negara yang paling mendapat perhatian dunia internasional dibanding negara lain yang pada masa itu juga mengalami Musim Semi Arab (Fishman, 2007: 20). Seperti Suriah, Al-Qaeda juga ingin mendapat perhatian internasional.

Selain Al-Qaeda, terdapat organisasi Islam radikal lainnya yang secara masif memerangi keberadaan pemerintahan Bashar Al-Assad, yaitu Jabhat Al-Nusra . Sebelum Konflik Suriah ada, Jabhat Al-Nusra awalnya hanya merupakan *Front* Islam Suriah yang berada di bawah naungan ISI (Adraoui, 2019: 2-5). Seiring dengan eskalasi Konflik Suriah yang terjadi, sejak April 2013 Jabhat Al-Nusra memutuskan untuk bergabung dengan Al-Qaeda (The Economist, 20 Juli 2013). Keterlibatan Al-Nusra yang paling terkenal terjadi pada Februari 2012 lalu ketika mereka memimpin demonstrasi di Kota Homs, hingga Pemerintah Suriah menggunakan bom untuk pertama kalinya dalam meredakan demonstrasi yang ada (ITV, 12 Mei 2012).

Pada Maret 2012, Kofi Annan menyusun Skema Perdamaian untuk Suriah yang sifatnya tidak mengikat (*advisory*) dan mengusulkannya kepada Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab (Aljazeera, 27 Maret 2012). Ditambah lagi,

Tiongkok dan Rusia bersedia untuk mendukung dan meneruskan Skema tersebut (RFERL, 2012). Skema Perdamaian untuk Suriah pada intinya berisi enam tahapan yang harus dilalui dalam melakukan transisi politik di Suriah untuk mencapai perdamaian. Saat itu, Skema dari Kofi Annan menjadi panduan Dewan Keamanan PBB dalam menyusun Resolusi Nomor 2043 (UN, 2012).

Grafik 2.13. Dinamika Konflik Suriah Tahun 2012-2013



Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber

Pada Juni 2012, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan di Jenewa untuk membahas mengenai Skema dari Kofi Annan. Pertemuan tersebut mengundang negara Uni Eropa dan Liga Arab. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, karena walaupun semua anggota setuju akan adanya transisi politik di Suriah, Amerika Serikat dan Rusia tidak setuju bila intervensi akan Konflik Suriah dijalankan di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB. Keengganan Amerika Serikat dan Rusia membuat pihak-pihak lain yang diundang termasuk Dewan Keamanan PBB, juga enggan untuk mengusulkan kontribusi yang lebih jauh. Keadaan tersebut kemudian menggagalkan cita-cita PBB yang ingin

mensponsori dan mewujudkan 2012-2015 sebagai ‘Tahun-tahun Perdamaian’ (Beaumont, 2012) .

Pada bulan yang sama, Turki mendeklarasikan bahwa mereka memutus kedekatannya dengan Suriah. Hal tersebut disebabkan oleh pesawat tempur Suriah yang tidak sengaja menembak pesawat Turki ketika meredam demonstrasi yang terjadi di Kota Douma (Al Arabiya, 3 Juli 2012). Sejak saat itu, Turki menyatakan bahwa Suriah merupakan ancaman militer bagi kedaulatan wilayah mereka (Çakmak, 2016: 4).

Pada Juli 2012, status Konflik Suriah telah berubah menjadi Perang Suriah (ICRC, 2012: 1032). Selain itu, berbagai kelompok oposisi lokal bergabung menjadi satu gerakan nasional yang bernama Al-Jaysh as Suri Al Hurr (*Free Syrian Army/FSA*) (Carnegie, 2012) dengan keanggotaan sebanyak 50.000 orang (Hove & Mutanda, 2015: 560). Baik Pemerintah maupun FSA memerangi satu sama lain menggunakan pesawat tempur. Konflik ini dinyatakan sebagai perang karena bukan hanya pasukan Presiden Assad yang kali ini melakukan pembantaian terhadap kubu oposisi, namun kubu oposisi juga melakukan *show of force* untuk membantai pasukan Pemerintah. Serangan pertama dari FSA merupakan pengeboman terhadap tiga posko keamanan Pemerintah di Kota Damaskus dan mereka menduduki penuh bagian utara Kota Aleppo serta menaruh persediaan senjatanya di sana (Black, 2012).

Pada Agustus 2012, Presiden Suriah memecat Perdana Menteri Riad Hijab karena beliau diketahui sebagai pendukung kelompok oposisi Pemerintahan (Petersen, 2012). Bersamaan dengan hal tersebut, Presiden Obama memberi peringatan bahwa Amerika Serikat telah mengetahui rencana Suriah untuk

menggunakan senjata kimia guna mengatasi keberadaan FSA. Presiden Obama mengungkapkan apabila penggunaan senjata kimia tersebut terbukti, Amerika Serikat akan langsung melakukan intervensi (BBC, 21 Agustus 2012).

Pada Oktober 2012, kebakaran terjadi secara menyeluruh di Kota Aleppo. Kebakaran tersebut dieksekusi oleh FSA yang juga melakukan pengeboman di berbagai kota untuk menghancurkan pasukan Pemerintah (Taylor, 2012).

Pada November 2012, Qatar membentuk sebuah koalisi nasional yang dinamakan *National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces*. Koalisi tersebut mendukung keberadaan para kelompok oposisi kecuali pasukan militer yang mengatasnamakan Islam dan organisasi teroris (Carnegie, 2012). Liga Arab mendukung dan mengakui keberadaan koalisi dari Qatar tersebut (Aljazeera, 27 Maret 2013).

Pada Desember 2012, Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, Turki, dan *Gulf Cooperation Council* (GCC) secara resmi mengumumkan bahwa mereka mendukung kelompok anti-Pemerintah. Mereka menyebutkan bahwa suara kelompok oposisi merupakan suara rakyat Suriah yang sebenarnya (Landler, 2012).

Pada Januari 2013, Suriah menuduh bahwa Israel mensponsori pengeboman pangkalan militer Pemerintah di Damaskus oleh FSA (The Jerusalem Post, 30 Januari 2013). Di saat yang sama, Pemerintah Suriah bekerja sama dengan Hizbullah dalam merangkai seperangkat rudal anti pesawat tempur yang mereka kerjakan di Lebanon (Zion, 2013).

Hizbullah sebagai organisasi yang didukung oleh Iran, membantu Pemerintah Suriah dalam meredam kelompok oposisi di Kota Qusayr, dengan tujuan awal untuk menebarkan narasi ‘anti-amerika’ di Suriah (Ozarowski, 2018:

4). Kejadian tersebut menandai betapa besarnya peran Hizbullah dalam Konflik Suriah karena pada saat itu, kelompok oposisi habis terbantai dan tidak ada demonstrasi yang terjadi sampai Agustus 2013 (Chulov, 2013).

Walapun pada 2012 lalu Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melakukan intervensi terhadap penggunaan senjata kimia, pada Agustus 2013 penggunaan gas beracun oleh Pemerintah terhadap pemberontak di Kota Ghouta bagian Timur tidak membuat Amerika Serikat menunjukkan reaksi apapun (Landler, 2013). Penggunaan gas tersebut diperkirakan membunuh 650 warga sipil bukan demonstran (Aljazeera, 21 Agustus 2013).

Pada September 2013, Pengawas dari PBB mengumumkan bahwa penggunaan Senjata Berbahan Kimia oleh Pemerintah pada demonstrasi di Ghouta, Damaskus, pada Agustus 2013 adalah benar adanya. Presiden Assad pun mengakui hal tersebut dan berserah kepada kebijakan Dewan Keamanan PBB yang akan membersihkan stok Senjata Berbahan Kimia sampai Juni 2014 nanti (UN News, 23 Juni 2014).

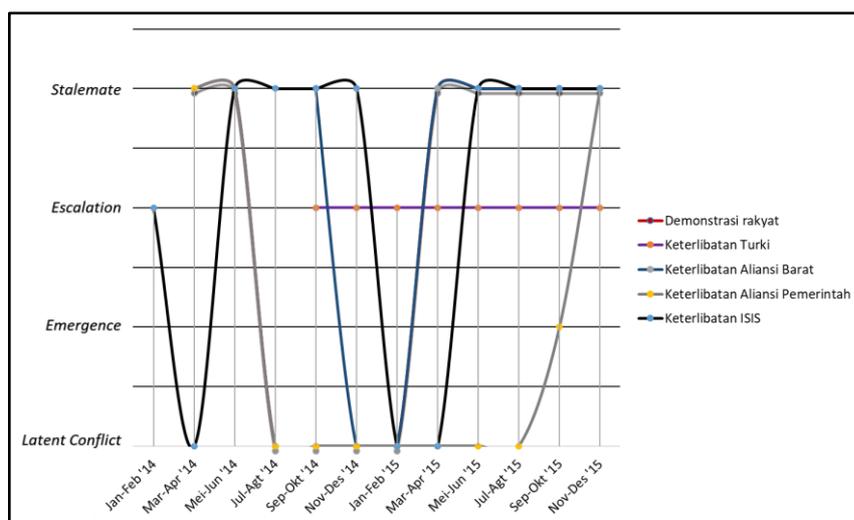
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Britania Raya telah menyatakan bahwa mereka tidak hanya mendukung *Free Syrian Army* (FSA), namun mereka juga mendukung seluruh keberadaan kelompok anti-pemerintahan di Suriah yang ikut memerangi pemerintahan bersama FSA. Namun pada Desember 2013, Amerika Serikat dan Inggris menyanggah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa mereka hanya mendukung keberadaan FSA saja (Spencer, 2013). Hal di atas disebabkan oleh beberapa kelompok pemberontak kecil yang menghancurkan pangkalan tentara FSA di Aleppo. Penghancuran tersebut mengatasnamakan Islam

dan menuduh FSA sebagai pembawa kepentingan barat dalam Konflik Suriah (BBC, 11 Desember 2013).

2.2.3. 2014-2015: Kejayaan ISIS, Pasukan Kurdi, dan Intervensi Rusia

Dari tahun 2013 sampai akhir tahun 2014, Pemerintah Suriah fokus untuk meredakan demonstran di Kota Homs dan Kota Hama dengan jumlah serangan sebanyak 2037 kali dan 1554 kali (Price, Gohdes, & Ball, 2015: 16). Namun tahun 2015 secara umum merupakan babak *Escalation* pada Konflik Suriah, karena yang terpenting dari periode ini adalah keterlibatan Rusia dan penjarahan Al-Qaeda pada tahun 2014 yang membuat seluruh aspek dari Konflik Suriah tereskalasi dengan cepat.

Grafik 2.14. Dinamika Konflik Suriah Tahun 2014-2015



Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber

Pada bulan Januari 2014, Al-Qaeda mulai menjarah dan menduduki wilayah Suriah dan Irak. Al-Qaeda mendeklarasikan bahwa mereka akan membentuk kekhilafahan baru yang berpusat di Kota Raqqa (Moore, 2014). Di sisi lain, PBB mengundang perwakilan FSA dan Pemerintah Suriah untuk melakukan perjanjian damai. Namun, pertemuan tersebut gagal menghasilkan kompromi karena

Pemerintah Suriah menolak untuk melakukan transisi pemerintahan dan masih ingin mempertahankan keadaan yang ada dengan alasan kedaulatan (Bellal, 2015). Grafik 2.14. menunjukkan bahwa Konflik Suriah masih diwarnai oleh *Stalemate* yang terjadi di antara berbagai pihak. Saat itu Al-Qaeda mendeklarasikan bahwa mereka berganti nama menjadi *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) (Wilson Center, 2017: 10). Hal ini juga mengubah polarisasi gerakan Islam di Suriah yang dahulunya merupakan pro dan oposisi Pemerintah, menjadi pro dan oposisi ISIS (Smith, 2020: 4-5). Posisi ISIS di Suriah mirip dengan posisi FSA, yaitu organisasi semi-militer yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Presiden Assad. Namun terdapat alasan yang berbeda dibalik tujuan tersebut. FSA merupakan organisasi moderat yang hanya bertujuan untuk menggulingkan rezim yang ada dan perjuangan FSA tidak didorong oleh ideologi radikal apapun. Lagipula, FSA hanya menampung dan mempersenjatai rakyat pemberontak yang ada ke dalam enam markas pusat mereka (Holliday, 2012: 14-17). Di sisi lain, ISIS merupakan organisasi Jihadis yang ingin mendirikan kekhilafahan Timur Tengah dengan Suriah sebagai salah satu pusatnya, hal itulah yang memotivasi ISIS untuk menggulingkan rezim Presiden Assad. Radikalisme Islam yang diusung membuat pihak-pihak yang terlibat dalam Konflik Suriah tidak memandang ISIS sebagai oposisi Pemerintah, melainkan sebagai organisasi teroris.

Bulan Maret sampai Mei 2014 dipenuhi oleh kekalahan kaum oposisi terhadap tentara Pemerintah. Misalnya pada Maret 2014, Pemerintah dan Hizbullah mengalahkan pasukan pemberontak non-organisasi di Kota Yabroud, yang dikenal sebagai salah satu kelompok pemberontak yang kuat di Suriah (BBC, 16 Maret 2014). Pada Mei 2014, kaum oposisi di Kota Homs menyerah secara serentak dan

bersedia untuk mengosongkan kota dan pergi ke daerah pesisir seperti yang diimbau oleh Pemerintah (Mroue, 2014).

Pada Juni 2014, ISIS mendeklarasikan bahwa kekhalifahan mereka sudah meluas dari Kota Raqqa ke Kota Aleppo di bagian utara Suriah sampai Provinsi Diyala, Kota Failuja, di bagian selatan Irak (Sashim, 2014: 13). Mulai masa perluasan tersebut, para militan bersenjata dari ISIS merebak secara cepat ke seluruh negeri, yang membuat Amerika Serikat bereaksi tegas terhadap hal tersebut. Pada September 2014, Amerika Serikat menurunkan Koalisi Anti-ISIS ke Suriah dan mulai melakukan intervensi kemanusiaan dengan melakukan serangan udara di Kota Aleppo dan Kota Raqqa yang diduduki oleh ISIS (Drennan, 2014). Serangan tersebut dibantu oleh *Yekîneyên Parastîna Gel* (YPG) atau kerap disebut sebagai Pasukan Kurdi (Letsch, 2014). Berbagai serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan YPG sementara berhasil menghancurkan milisi ISIS pada Januari 2015 (BBC, 26 Januari 2015).

Gambar 2.2. Wilayah Kejayaan ISIS sampai Bulan Juni 2014



Sumber: *Institute for the Study of War*, 2014

Keberadaan pasukan Kurdi disisi Amerika Serikat membuat hubungan Amerika Serikat dan Turki menjadi buruk (Karademir, 2019: 38). Turki menganggap Pasukan Kurdi sebagai bagian dari *Partiya Karkerên Kurdistanê* (PKK) atau Partai Buruh Kurdi. PKK merupakan organisasi terlarang berideologi Marxis dan diberi label teroris oleh Pemerintah Turki (Paasche, 2015: 77). Label teroris tersebut diberikan atas perjuangan yang dilakukan PKK untuk melakukan separatisme di beberapa daerah Turki (Minorities at Risk Project, 2004).

Keberadaan YPG yang awalnya hanya ingin memusnahkan ISIS berubah menjadi keinginan untuk turut serta menguasai wilayah Suriah (Parlar Dal, 2016: 10-11). Pada Maret 2015, Pasukan Kurdi mengklaim bahwa mereka telah menduduki bagian barat laut Kota Idlib (TRT World, 15 Maret 2019). ISIS yang telah terpuak mundur dari sana berusaha menduduki Kota Palmyra yang terletak di Suriah bagian tengah (Rifai, 2015). Di Idlib, YPG berhadapan dengan Jaish al-Fatah, organisasi pemberontak berideologi Islam yang selama ini telah menduduki Kota Idlib dan kerap berperang dengan pasukan pemerintah di daerah Sungai Latakia (Hubbard, 2015).

Pada September 2015 Konflik Suriah memasuki babak baru yang sangat penting, yaitu keikutsertaan Rusia dalam mengintervensi Konflik Suriah. Intervensi ini didasari oleh berkembangnya narasi mengenai 'anti-Amerika di Timur Tengah' di Rusia (Dannreuther, 2018: 5). Rusia menyatakan bahwa mereka pro terhadap rezim Presiden Assad dengan memberikan bantuan militer ke Pemerintah Suriah (Charap, 2019: 3). Intervensi Rusia dimulai dengan cara yang keras, yaitu dengan melakukan serangan udara di daerah Sungai Latakia, dengan alasan untuk memerangi keberadaan organisasi Islam radikal yang terdapat di sana (Aboufadel,

2015). Sementara, aliansi barat dan kelompok oposisi pemerintah menganggap bahwa serangan tersebut bermakna untuk mengusir keberadaan mereka dari Suriah. Perbedaan pandangan di atas membuat Konflik Suriah tereskalasi dengan cepat dan memunculkan berbagai babak baru kedepannya.

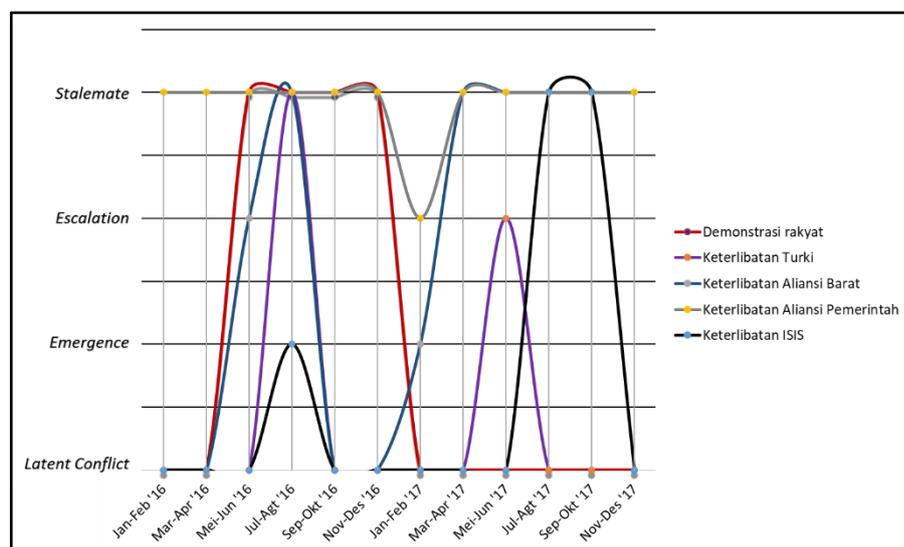
Akhir tahun 2015 ditutup dengan keberhasilan Pemerintah dan Rusia pada bulan Desember dalam merebut kembali Kota Homs, setelah empat tahun dicap sebagai salah satu markas utama ISIS (Aboufadel, 2015).

2.2.4. 2016-2017: Kepergian ISIS

Tahun 2016-2017 juga ditandai dengan kesengajaan Pemerintah Suriah untuk menghalangi bantuan kemanusiaan yang masuk dari PBB, LSM Lokal, dan LSM Internasional bagi para korban perang (Meininghaus, 2016). Tahun-tahun ini sepenuhnya merupakan babak *Stalemate*, sebagai lanjutan dari berbagai eskalasi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Meski pada bulan Februari 2016 Amerika Serikat dan Rusia telah melakukan perjanjian untuk tidak melakukan gencatan senjata, keduanya tetap melakukan serangan dengan alasan untuk mengawal transisi politik di Suriah dan mengusir ISIS (Daugidas & Mortenson, 2017: 170). Misalnya ketika Amerika Serikat melakukan serangan udara Kota Homs sepanjang tahun 2015 untuk memerangi ISIS, dan ketika bulan Februari sampai Maret 2016 Pemerintah Suriah kembali mendapat kejayaannya karena berhasil menguasai seluruh Kota Idlib dan Kota Palmyra yang dibantu oleh pasukan Rusia (Lamb, 2016). Pemerintah Suriah bersama Hizbullah juga berhasil memusnahkan kaum ISIS dari kedua kota tersebut (Aboufadel, 2016). Pada Juli 2016, Jabhat Al-Nusra mengumumkan bahwa mereka telah memisahkan diri dari ISIS dan berganti nama

menjadi Jabhat Fatah Al-Sham, nama tersebut berarti ‘Gerakan Penakluk Daerah *Levant*’.

Grafik 2.15. Dinamika Konflik Suriah Tahun 2016-2017



Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber

Melalui sebuah video, Mohammed Al-Jaelani sebagai ketua Al-Sham mengungkapkan bahwa perpisahan tersebut disebabkan karena mereka tidak ingin terlibat dengan organisasi eksternal manapun, bahwa Jabhat Fatah Al-Sham juga merupakan kelompok yang merepresentasikan suara rakyat Suriah (Al-Jaelani, 2016). Al-Jaelani juga mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia seharusnya tidak menyerang keberadaan Jabhat Fatah Al-Sham karena mereka bukanlah teroris seperti ‘organisasi Jihadis lainnya’ (Al-Jaelani, 2016). Dengan demikian, dapat ditarik premis bahwa perpisahan Al-Nusra dan ISIS bukan disebabkan oleh perbedaan ideologi seperti yang biasanya terjadi pada sesama organisasi Jihadis, perpisahan ini tidak lain merupakan politik Al-Nusra untuk mencari posisi aman dalam mencampuri Konflik Suriah dengan menjauhkan diri dari posisi ISIS yang tidak menguntungkan, yaitu sebagai organisasi teroris yang sedang mendapat perhatian penuh dari dunia internasional. Hal ini tentu mengubah pemetaan Konflik

Suriah, dimana ISIS turut disingkirkan oleh Jabhat Al-Nusra dan posisi ISIS semakin melemah di Suriah.

Pada Agustus 2016, terdapat dua pihak yang paling gencar dalam memerangi ISIS, yaitu Pasukan Turki dan YPG. Pasukan Turki fokus dalam memerangi kaum ISIS yang berada di daerah perbatasan (Lin, 2016: 2), sementara YPG fokus dalam memerangi kaum ISIS yang ada pada dataran Suriah. Selain itu, YPG mendapat reputasi sebagai pasukan terdepan dalam memusnahkan militan ISIS (Lin, 2016: 4). Walaupun sama-sama bertujuan memerangi ISIS, antara Turki dan YPG memiliki persepsi yang buruk terhadap satu sama lain. Selain memerangi ISIS, Turki juga memerangi Pasukan YPG. Dataran Suriah yang menjadi tempat YPG dalam memerangi ISIS ingin dijadikan sebagai Zona Kontrol Baru oleh Turki (ARA News, 26 Agustus 2016). Dari keadaan di atas, dapat ditarik premis bahwa Turki ingin menjadi pihak yang lebih terdepan dari YPG dalam memerangi ISIS.

Di sisi lain, Pemerintah terus-menerus mengepung dan membombardir para pemberontak di seluruh negeri dari Februari hingga Desember 2016. Pengepungan tersebut dilakukan oleh tiga pihak, yaitu: Pemerintah Suriah sebagai penyusun rencana, Rusia sebagai pemasok senjata, pesawat tempur, dan tentara yang berasal dari pendukung Uni Soviet (Sakiev, 2020), serta Iran sebagai pelaksananya (Tabrizi, 2016: 19). Pada Desember 2016, pasukan Pemerintah Suriah, Rusia, dan Iran, berhasil menghancurkan Kota Aleppo sebagai kota terbesar di Suriah yang juga terkenal sebagai pangkalan berbagai kaum pemberontak, termasuk FSA (CSIS, 2019). Keadaan di atas membuat bulan November 2016 ditandai berbagai media sebagai kebangkitan kembali rezim Presiden Assad di Suriah (Mroue, 2016; Bassam, 2016; Dehghan, 2016).

Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengimbau agar setiap pihak yang terlibat mengupayakan agar Kota Aleppo dapat menjadi Zona De-Eskalasi Konflik Suriah, yang selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Nomor SC/12829 dan resolusi nomor 2336 (UN, 2017). Menanggapi hal tersebut, Rusia, Iran, dan Turki, mengadakan pertemuan di Kota Astana, Kazakhstan pada Januari 2017 lalu. Melalui pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat untuk meredam berbagai gencatan senjata yang terjadi di Suriah dan melakukan de-eskalasi konflik di sana (MFA Russia, 2017). Namun kesepakatan di atas tidak memiliki kelanjutan karena pada akhirnya Rusia, Iran, dan Turki, tidak dapat menyepakati wilayah Suriah bagian mana saja yang akan dijadikan tempat de-eskalasi terlebih dahulu, dan Pemerintah Suriah menolak rencana de-eskalasi tersebut. (RFERL, 5 Juli 2017; Gladstone, 2017).

Pada Maret 2017, terdapat tambahan aktor yang mengintervensi Konflik Suriah, yaitu Israel. Sebenarnya Israel telah terlibat dalam Konflik Suriah sejak 2013 lalu, yaitu dengan rutin memberikan bantuan kemanusiaan terhadap evakuasi korban perang di Suriah (Stand With Us, 2018). Namun, Israel mulai menggunakan kekuatan secara nyata saat 2017 lalu. Saat itu, Israel melakukan serangan udara terhadap kaum Hizbullah di Suriah (Baker, 2017). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hizbullah merupakan organisasi militan yang disokong oleh Iran, yang secara tidak langsung merupakan pihak yang pro-pemerintahan. Serangan Israel tersebut secara terang-terangan mereka nyatakan sebagai peringatan terhadap keberadaan Iran di Konflik Suriah (Staff, 2017). Walaupun memerangi kaum pro-pemerintahan, sampai saat ini Israel masih menyatakan bahwa mereka memiliki

posisi yang netral dalam Konflik Suriah dan tidak mau melabeli diri sebagai pendukung oposisi (Jones, 2017).

Pada April 2017, Presiden Donald Trump menjatuhkan rudal jelajah terhadap pangkalan militer Pemerintah Suriah di Kota Homs. Rudal tersebut diluncurkan sebagai peringatan Amerika Serikat akan Pemerintah Suriah yang menggunakan senjata kimia dalam memerangi pemberontak yang ada di Kota Idlib, daerah Khan Shaykun (Gordon, 2017). Selain meluncurkan rudal, Amerika Serikat juga mempersenjatai Pasukan Kurdi pada Mei 2017. Senjata tersebut akan digunakan untuk memerangi ISIS di Kota Raqqa sebagai ibukota *de facto* Suriah yang diklaim oleh ISIS (The Guardian, 9 Mei 2017). Tindakan Amerika Serikat di atas dipersepsikan Turki sebagai ancaman nasional yang ditandai oleh perkataan Presiden Erdogan bahwa “Memerangi organisasi teroris tidak dapat dilakukan dengan mengirim pasukan teroris pula.” (Hackwill, 2017), mengingat YPG merupakan organisasi yang diberi label teroris di Turki.

Selain Pasukan Kurdi, terdapat pihak oposisi utama lain yang juga memerangi rezim Presiden Assad, yaitu *Haylawotho d'Suriya Demogratoyto* atau *Syrian Democratic Forces* (SDF). Baik SDF maupun FSA sama-sama merupakan kaum oposisi nasional yang memperoleh dukungan dari aliansi barat, yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. Bila FSA berfokus untuk menggulingkan rezim Presiden Bashar Al-Assad, SDF berfokus untuk memerangi para organisasi Islam radikal seperti ISIS dan Jabhat Al-Nusra, serta membentuk Negara Federal Rojava di bagian utara Suriah (Dinc, 2020: 57).

Bulan Juni sampai Desember 2017 benar-benar diwarnai dengan pertempuran antara berbagai pihak di Kota Raqqa. Misalnya pada Juni 2017 saat

Amerika Serikat membalas bom yang dijatuhkan Pemerintah terhadap pasukan SDF dengan menembak jatuh pesawat tempur Pemerintah Suriah di Kota Raqqa (Dearden, 2017). Lalu pada Juli 2017, tentara Pemerintah Suriah dan pasukan dari Hizbullah melakukan agresi militer di Kota Aarsal, yaitu daerah Lebanon yang berbatasan langsung dengan Suriah. Agresi militer tersebut ditujukan untuk memusnahkan berbagai pasukan dari organisasi berideologi Islam yang diperkirakan ingin memasuki Suriah. (Bassam, 2017).

Rusia dan Pemerintah Suriah juga memiliki linimasa tersendiri mengenai perjuangan untuk melawan ISIS. Perjuangan yang dilakukan aliansi pro pemerintahan terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, namun Rusia dan Pemerintah melakukannya di kota yang berbeda. Misalnya ketika Maret 2017, mereka melakukan serangan udara di pinggiran Sungai Efrat dan Kota Palmyra untuk mengusir pasukan ISIS dan mengambil alih ladang gas alam yang sebelumnya dikuasai ISIS di sana (Sly, 2017). Pada Mei 2017, Rusia menggunakan pangkalan militer Al-Jarrah milik pemerintah untuk memusnahkan pasukan ISIS yang ada di Kota Aleppo bagian selatan, yaitu daerah Maskaneh (Reuters, 13 Mei 2017). Pada Juni 2017, Rusia memerangi sisa-sisa pasukan ISIS yang berada di bagian timur Kota Aleppo, yaitu di daerah Khanaser (ICG, 2017). Pada Agustus 2017 Rusia melakukan serangan udara kepada ISIS di Kota Hama, hingga pada Oktober aliansi Pemerintah mengumumkan bahwa wilayah tersebut telah bersih dari ISIS. Pada September 2017, Rusia dan Hizbullah melakukan serangan udara di Kota Deir ez-Zor untuk menyerang keberadaan ISIS dan SDF di sana (Illingworth, 2017), meskipun musnahnya ISIS dari Deir ez-Zor disebabkan oleh pengeboman yang dilakukan

Amerika Serikat pada bulan November. Di bulan yang sama, Rusia dan Pemerintah Suriah juga berhasil membersihkan pasukan ISIS dari 10 daerah di Kota Hama dan mendeklarasikannya pada bulan November bahwa ISIS telah musnah dari Kota Hama (Aboufadel, 2017). Pada bulan Oktober 2017, pasukan Pemerintah Suriah memusatkan kekuatannya di bagian tenggara Kota Damaskus, yaitu Gunung Qalamoun. Di sana, Rusia berhasil mengusir keberadaan ISIS dari Damaskus, walau Hizbullah sudah berusaha sejak Agustus di Gunung Qalamoun (The Daily Star Lebanon, 23 Agustus 2017)

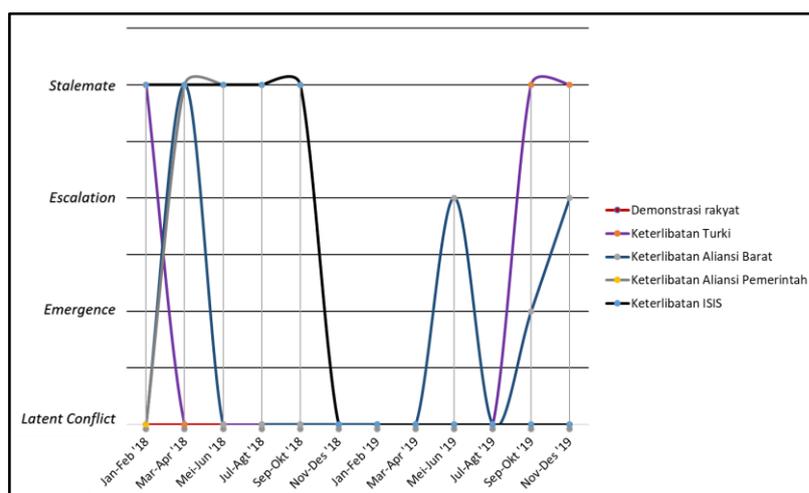
Oktober dan November 2017 merupakan puncak perjuangan Amerika Serikat dan aliansi Pemerintah untuk mengusir ISIS dari Suriah. Saat itu Amerika Serikat melakukan 12 kali pengeboman di Kota Raqqa dan Kota Deir ez-Zor untuk mengusir keberadaan ISIS di sana. Atas intervensi tersebut, Presiden Trump merilis pernyataan bahwa Amerika Serikat telah berhasil mengusir ISIS dari Suriah (Barnard, 2017; US National Security and Defense, 21 Oktober 2017). Klaim itu bertindihan dengan klaim Pemerintah Suriah yang juga merasa bahwa mereka merupakan pihak yang berhasil mengusir keberadaan ISIS (The Islamists, 28 November 2017). Pada Desember 2017 Presiden Putin bahkan pergi ke pangkalan militer Hmeimim di Suriah untuk merayakan kemenangan yang terjadi. Di sana beliau mengungkapkan “Dalam kurang dari dua tahun, pasukan bersenjata dari Rusia dan Pemerintah Suriah telah berhasil mengalahkan kelompok teroris yang paling kuat di dunia” (Kremlin Moskwa, 11 Desember 2017).

2.2.5. 2018-2019: Antusiasme Turki

Walaupun berbagai kekerasan masih terjadi di tahun ini, namun 2018-2019 merupakan babak eskalasi baru pada Konflik Suriah. Pada tahun ini, Amerika

Serikat menggeser fokusnya pada perebutan ladang minyak dan gas alam di Suriah, serta Turki juga memiliki antusiasme baru pada konflik ini. Tahun 2018 diawali dengan serangan udara yang dilakukan oleh Turki ke Kota Afrin di bagian utara Suriah. Serangan tersebut ditujukan kepada Pasukan Kurdi yang dianggap Turki bermaksud untuk menguasai Kota Afrin (The Guardian, 21 Januari 2018). Melihat keadaan tersebut, Rusia menarik mundur pasukannya yang sebelumnya berjaga-jaga di Kota Afrin dengan tujuan untuk memperjelas bahwa tensi yang terjadi bukanlah tanggung jawab Pemerintah Suriah, melainkan merupakan tensi sekunder yang hanya terjadi antara Amerika Serikat, Turki, dan Pasukan Kurdi (Uras, 2018).

Grafik 2.16. Dinamika Konflik Suriah Tahun 2018-2019

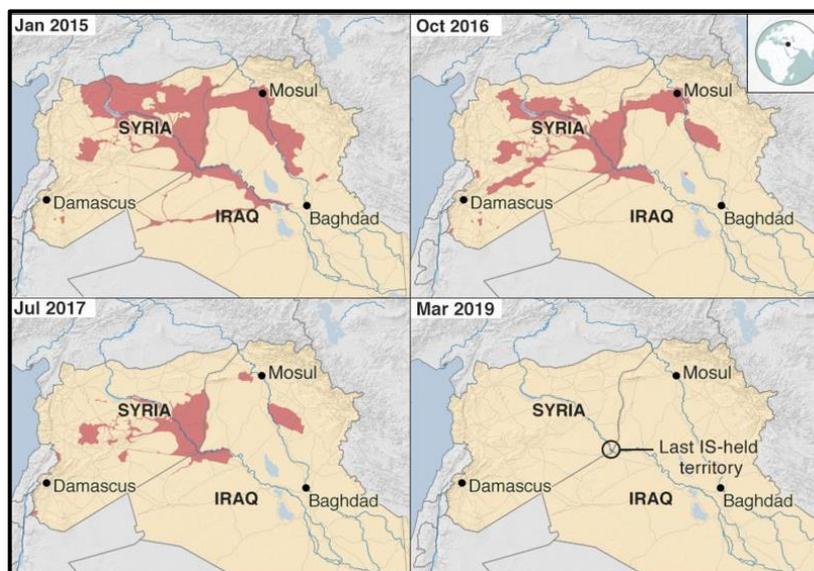


Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber

Pada April 2018, Pemerintah Suriah mengklaim bahwa mereka telah menguasai kembali Kota Ghouta bagian Timur. Klaim tersebut terjadi bersamaan dengan serangan yang dilakukan Pemerintah Suriah bersama Rusia di berbagai daerah untuk mengusir kaum pemberontak, terutama FSA (Aljazeera, 12 April 2018). Saat itu, pemberontakan yang paling besar terjadi di Kota Douma dan Tentara Suriah melakukan serangan terhadap kaum pemberontak dengan menggunakan senjata berbahan kimia di sana. Menurut temuan *Organisation for*

the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), senjata tersebut berbahan dasar klorin, sama seperti senjata kimia yang digunakan Pemerintah Suriah dalam 84 serangan sebelumnya semenjak temuan tahun 2015 (OPCW, 2019). Seminggu berikutnya, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis, menjatuhkan hukuman ke Pemerintah Suriah dengan melakukan serangan udara kepada Tentara Suriah di Kota Douma pula (DW, 2018). Saat itu, perjuangan Pemerintah untuk memusnahkan kaum pemberontak dilakukan secara tersistem dari arah Selatan ke Utara. Misalnya pada Juli 2018, Pemerintah Suriah mengklaim bahwa mereka telah menguasai seluruh pinggir wilayah di bagian selatan, sampai ke perbatasan dengan Yordania dan teritori Israel di sana (Scharf, 2020: 15). Sampai pada Agustus 2018, Pemerintah dan Rusia juga berhasil merebut kembali Kota Idlib dari FSA (International Crisis Group, 2018).

Gambar 2.3. Penyusutan Wilayah Kekuasaan ISIS di Suriah



Sumber: BBC, 2019

Bulan September sampai Desember 2018 diisi dengan perjuangan Pasukan Kurdi dan SDF dalam menyudutkan daerah teritori ISIS di Suriah sampai ke perbatasan dengan Irak. Perjuangan tersebut dilakukan dengan melakukan

pengeboman dan serangan udara yang disponsori oleh Amerika Serikat (Aljazeera, 11 Februari 2019). Karena hal itu pula pada Maret 2019, SDF mengumumkan bahwa kekhalifahan ISIS telah habis di Suriah (Wedeman, 2019). Diperkirakan, terdapat 55.000 orang tahanan ISIS yang dipenjara di Suriah dan Irak atas pengusiran yang terjadi saat itu (MFA Netherlands, 2019: 83).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada tahun 2017 Israel mengatakan bahwa intervensi yang mereka lakukan di Konflik Suriah adalah intervensi yang bersifat netral. Namun pada Juni 2019, Israel melakukan propaganda dengan menamai salah satu desa di Dataran Tinggi Golan sebagai Desa Trump (*Trump Heights*) (Holmes, 2019). Dataran Tinggi Golan merupakan salah satu wilayah di Suriah yang dimenangkan oleh Israel pada perang mereka tahun 1967 (Korman, 1996: 323). Memang, keadaan di atas tidak memiliki implikasi langsung terhadap Konflik Suriah, namun penamaan Desa Trump menandakan bahwa Israel berada pada pihak barat dalam konflik ini.

Selama 2019, Konflik Suriah tidak memiliki dinamika yang fluktuatif seperti yang terjadi di 8 tahun sebelumnya, sampai saat Presiden Donald Trump menyebut Konflik Suriah sebagai “Perang Konyol yang Tidak Berkesudahan” dan mengumumkan bahwa mereka akan menarik pasukannya dari bagian utara Suriah pada Oktober 2019 lalu (Cohen, 2019). Penarikan pasukan tersebut dilanjut dengan pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan bahwa mereka akan memerangi Pasukan Kurdi/YPG yang ada di Suriah (Turak, 2019). Tentunya tindakan berani Presiden Erdogan disebabkan oleh kepergian Amerika Serikat sebagai penyokong YPG di Suriah. Di sisi lain, YPG juga mengumumkan bahwa mereka telah resmi ‘dibuang’ oleh Amerika Serikat (Hubbard, 2019). Pernyataan tersebut tentunya

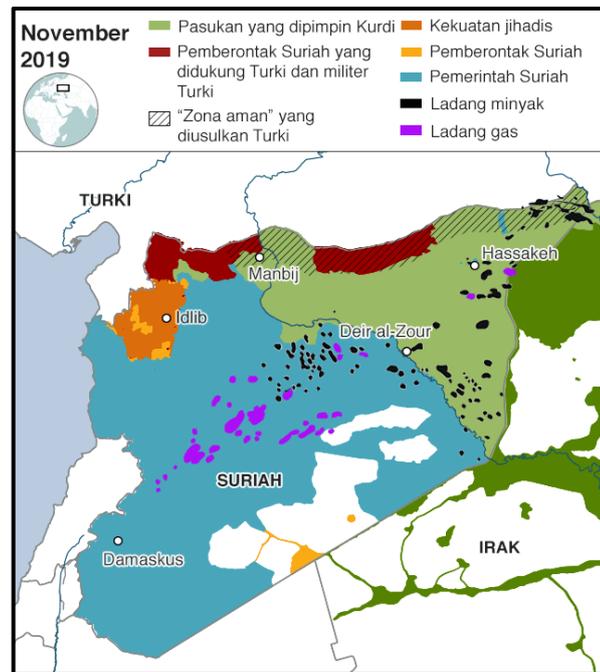
mengubah peta Konflik Suriah, dimana YPG tidak lagi termasuk dalam aliansi barat.

Meski menarik pasukannya, Amerika Serikat meninggalkan 500 tentaranya untuk menjaga beberapa titik ladang minyak di Suriah, bersamaan dengan Pemerintah Suriah, Rusia, dan berbagai organisasi Islam radikal yang juga meletakkan tentaranya di sana (The Guardian, 10 November 2019). Permasalahan ladang minyak ini dimulai pada 2018 lalu dimana Pemerintah Suriah menyepakati kerjasama di bidang energi, bahwa Rusia memiliki wewenang untuk mengelola cadangan minyak dan gas alam di Suriah sebagai balasan atas pendampingan Rusia selama ini (Russia Business Today, 15 Februari 2018). Presiden Donald Trump kemudian menyatakan bahwa Amerika Serikat juga berhak mendapat bagian dari pengelolaan minyak dan gas alam tersebut, karena tentara Amerika Serikat ikut menjaga keberadaan ladang-ladang minyak yang ada (Carlisle, 2019). Maka dari itu tidak seperti YPG, Amerika Serikat tetaplah merupakan aktor yang memiliki peran dalam Konflik Suriah, namun dengan kepentingan yang berbeda.

Kepergian Amerika Serikat justru membangkitkan antusiasme Turki dalam mengintervensi Konflik Suriah. Turki memusatkan serangannya di Kota Manbij, wilayah perbatasan di utara yang dulunya merupakan salah satu tempat pasukan Amerika Serikat dan saat itu merupakan tempat Pasukan Kurdi berada (Aljazeera, 14 Oktober 2019). Turki menyatakan bahwa memerangi Pasukan Kurdi bertujuan untuk menjadikan Kota Manbij dan sekitarnya sebagai “Zona Aman” karena mengusir YPG berarti mengusir pihak teroris yang terlibat dalam Konflik Suriah (Hurriyet, 2019). Serangan dari Turki terhadap YPG menuai reaksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Uni Eropa memutuskan untuk memutus seluruh ekspor

senjata ke Turki (Weise, 2019) dan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia akan ‘menghabisi dan melenyapkan’ perekonomian Turki bila tetap melakukan penyerangan di sana (Reuters UK, 10 Oktober 2019).

Gambar 2.4. Pemetaan Kekuasaan di Wilayah Suriah pada Akhir 2019



Sumber: BBC, 2019

2.3. Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Suriah

Terdapat 18 dokumen resolusi Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai langkah-langkah penyelesaian Konflik Suriah. Di bagian ini Penulis akan membahas mengenai 18 resolusi tersebut sebagai bahan analisis mengenai kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan Konflik Suriah yang akan dibahas di Bab III nantinya.

Keterlibatan Dewan Keamanan PBB dimulai dari resolusi nomor 2042 yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2012. Resolusi tersebut mengumumkan bahwa

Dewan Keamanan PBB setuju untuk menggunakan enam Skema Perdamaian yang diajukan Kofi Annan untuk menyelesaikan Konflik Suriah¹. Di dalam resolusi 2042

disebutkan:

“... to implement the six-point proposal of the Joint Special Envoy of the United Nations and the League of Arab States, and to implement urgently and visibly its commitments, as it agreed to do in its communication to the Envoy of 1 April 2012, ...” (UNSC, 2012: 1)

Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga mengirimkan badan pengawas yang beranggotakan 30 orang ke Suriah untuk memantau pelaksanaan dari Skema Perdamaian di atas. Di dalam resolusi 2042 disebutkan:

“Decides to authorize an advance team of up to 30 unarmed military observers to liaise with the parties and to begin to report on the implementation of a full cessation of armed violence in all its forms by all parties, ...” (UNSC, 2012: 2)

Skema perdamaian dalam resolusi 2042 terdiri dari enam imbauan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Suriah, yaitu (UNSC, 2012: 4):

1. Adanya komitmen untuk selalu bekerja sama dengan badan pengawas yang diutus dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan dari rakyat Suriah, serta berkomitmen untuk mengirimkan utusan yang layak apabila sewaktu-waktu badan pengawas perlu berdialog dengan Pemerintah Suriah;
2. Adanya komitmen untuk mendengarkan saran-saran efektif dari badan pengawas dalam menghentikan kekerasan yang sedang terjadi, demi keamanan rakyat dan wilayah Suriah itu sendiri;
3. Bantuan kemanusiaan akan diberikan secara tepat waktu di seluruh wilayah yang sedang mengalami pertempuran. Untuk itu, seluruh wilayah yang terlibat harap menyediakan waktu jeda dalam melakukan pertempuran

¹ Lihat Bab II halaman 42.

selama dua jam dalam sehari untuk menerima bantuan kemanusiaan yang datang;

4. Mempercepat pembebasan tahanan politik di Suriah, terutama orang-orang ditahan tanpa pengadilan, orang-orang yang termasuk dalam kategori rentan, dan orang-orang yang ditahan karena melakukan aksi politik yang damai. Seseberapa mungkin daftar tahanan dan lokasi di mana mereka ditahan harus segera disampaikan agar proses pembebasan orang-orang tersebut dapat segera diatur;
5. Memberikan kebebasan kepada jurnalis di seluruh wilayah Suriah dan tidak bersikap diskriminatif dalam menghadapi mereka;
6. Menghormati hak berpendapat dan berserikat para demonstran karena hal tersebut juga sudah tertulis di dalam hukum;

Tidak lama setelahnya, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2043 pada tanggal 21 April 2012. Resolusi tersebut bertujuan untuk menyusun visi dan misi pengawasan Dewan Keamanan PBB di Suriah. Di dalam resolusi 2043 disebutkan:

“... agreed between the Syrian Arab Republic and the United Nations which provides a basis for a protocol governing the Advance Team and, upon its deployment, the UN supervision mechanism, ...” (UNSC, 2012: 2)

Badan pengawas yang sebelumnya berjumlah 30 orang, ditambah menjadi 300 orang dalam resolusi 2043. Badan tersebut juga diberi nama resmi, yaitu *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS). UNSMIS memiliki mandat selama 90 hari untuk melaksanakan tugasnya di Suriah dan kinerja mereka akan dinilai oleh Sekretaris Jenderal PBB. Di dalam resolusi 2043 disebutkan:

“Decides to establish for an initial period of 90 days a United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS) ... comprising an initial deployment

of up to 300 unarmed military observers... the Mission shall be deployed expeditiously subject to assessment by the Secretary-General...” (UNSC, 2012: 2-3)

Pada akhirnya, misi UNSMIS tidak membawa kemajuan bagi Konflik Suriah. Berakhirnya mandat pertama UNSMIS di Suriah ditandai dengan kebuntuan yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab dalam pertemuan mereka di Jenewa pada Juni 2012². Namunpun begitu, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2059 pada tanggal 20 Juli 2012. Resolusi tersebut bertujuan untuk memperpanjang mandat UNSMIS selama 30 hari. Di dalam resolusi 2059 disebutkan:

“Decides to renew the mandate of UNSMIS for a final period of 30 days, taking into consideration the Secretary-General’s recommendations to reconfigure the Mission, ...” (UNSC, 2012: 1)

Perpanjangan tersebut dibuat atas rekomendasi dari Sekretaris Jenderal PBB. Saat itu krisis di Suriah juga tereskalasi dengan cepat, salah satunya ketika *International Committee of the Red Cross* (ICRC) menaikkan status Konflik Suriah menjadi Perang Suriah pada awal Juli 2012³.

Dewan Keamanan PBB kemudian menerbitkan resolusi nomor 2118 pada tanggal 27 September 2013. Resolusi tersebut mengumumkan mengenai keterlibatan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) di Konflik Suriah. OPCW bertugas untuk untuk membentuk skema penghapusan penggunaan senjata berbahan kimia di Suriah. Di dalam resolusi 2118 disebutkan:

“Welcoming the decision of the Executive Council of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) of 27 September 2013 establishing special procedures for the expeditious destruction of the Syrian Arab Republic’s chemical weapons program...” (UNSC, 2013: 2)

² Lihat Bab II halaman 43.

³ Lihat Bab II halaman 44.

Resolusi ini dibuat karena Dewan Keamanan PBB menemukan penggunaan senjata berbahan kimia ketika Pemerintah Suriah meredam demonstran di Damaskus pada Agustus 2013 (UNSC, 2013: 1)⁴.

Seiring dengan berlanjutnya situasi krisis di Suriah, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2139 pada tanggal 22 Februari 2014 dengan tujuan untuk membuka akses bagi siapapun untuk memberikan bantuan kemanusiaan (UNSC, 2016: 2). Selain itu, Dewan Keamanan PBB membahas mengenai keterlibatan organisasi teroris untuk pertama kalinya dalam resolusi ini. Meski Al-Qaeda telah terlibat di Konflik Suriah sejak tahun 2012, namun Dewan Keamanan PBB baru memberi imbauan untuk memerangi mereka pada tahun 2014. Di dalam resolusi 2139 disebutkan:

“Strongly condemns the increased terrorist attacks... calls upon the Syrian authorities and opposition groups to commit to combating and defeating organizations and individuals associated with Al-Qaeda, its affiliates and other terrorist groups, ...” (UNSC, 2014: 4)

Pada Juli 2014, Dewan Keamanan PBB mengumumkan bahwa korban perang Suriah telah menghilangkan sekitar 150.000 jiwa dan terdapat 10 juta korban perang yang saat itu memerlukan bantuan kemanusiaan namun belum mendapatkannya (UNSC, 2014: 1). Dari keadaan tersebut, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2165 pada tanggal 14 Juli 2014 untuk membentuk mekanisme pemantauan mengenai hak asasi manusia para korban perang. Di dalam resolusi 2165 disebutkan:

“Decides to establish a monitoring mechanism, under the authority of the United Nations Secretary-General, to monitor, with the consent of the relevant neighbouring countries of Syria, the loading of all humanitarian relief consignments of the United Nations humanitarian agencies...” (UNSC, 2014: 3)

⁴ Lihat Bab II halaman 46.

Resolusi nomor 2165 juga secara tidak langsung memperingatkan Pemerintah Suriah mengenai temuan *Amnesty International* pada Maret 2014 lalu, bahwa Pemerintah Suriah sengaja menyembunyikan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan membiarkan para korban perang mengalami kelaparan di berbagai kamp konsentrasi (BBC, 10 Maret 2014). Di dalam resolusi 2165 disebutkan:

“... to allow humanitarian agencies safe and unhindered access to all affected areas in Syria in accordance with international humanitarian law, and recalls that starvation of civilians as a method of combat is prohibited by international humanitarian law;” (UNSC, 2014: 4)

Pada 6 Maret 2015, Dewan Keamanan PBB kembali memerhatikan isu penggunaan senjata berbahan kimia di Suriah melalui terbitnya resolusi nomor 2209. Resolusi ini berisi larangan untuk menggunakan senjata kimia berbahan gas klorin sesuai dengan temuan OPCW di Suriah. Di dalam resolusi 2209 disebutkan:

“Recalling that the Syrian Arab Republic acceded to the CWC, noting that the use of any toxic chemical, such as chlorine, as a chemical weapon in the Syrian Arab Republic is a violation of resolution 2118, ...” (UNSC, 2015: 1)

Namunpun begitu, Pemerintah Suriah masih terus menggunakan gas klorin sebagai senjata mereka sampai tahun 2018 nanti⁵. Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB juga terus memerhatikan penggunaan senjata berbahan kimia melalui resolusi nomor 2235 yang diterbitkan pada 7 Agustus 2015. Karena Suriah tidak termasuk dalam keanggotaan *Chemical Weapon Convention* (CWC) maka OPCW sebelumnya tidak dapat langsung menangkap Pemerintah Suriah (Pita & Domingo, 2014: 392). Maka dari itu, resolusi ini berisi permohonan kepada Sekretaris Jenderal PBB agar Dewan Keamanan memiliki wewenang bersama OPCW untuk membentuk tim investigasi

⁵ Lihat Bab II halaman 58.

bernama *Fact-Finding Mission* (FFM) guna menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan senjata berbahan kimia di Suriah dan menghentikannya. Di dalam resolusi 2235 disebutkan:

“Requests the UN Secretary-General, ...regarding the establishment and operation of an OPCW-United Nations Joint Investigative Mechanism... where the OPCW FFM determines or has determined that a specific incident in the Syrian Arab Republic involved or likely involved the use of chemicals as weapons, ...” (UNSC, 2015: 2)

Fokus Dewan Keamanan PBB mengenai senjata berbahan kimia di Suriah harus terbagi dengan intervensi Rusia sejak September 2015. Intervensi tersebut membuat Pemerintah Suriah semakin percaya diri dalam melakukan kekerasan dan situasi Konflik Suriah semakin jauh dari perdamaian⁶. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengadakan pembicaraan damai di Wina pada 14 November 2015 guna merenungkan situasi Konflik Suriah yang sudah melebar jauh dari masalah rezim Presiden Assad. Pertemuan di Wina terdiri dari 20 pihak yang memiliki kepentingan di Konflik Suriah, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Britania Raya, Perancis, Jerman, Italia, Iran, Irak, Mesir, Yordania, Lebanon, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan perwakilan dari PBB untuk Suriah. Melalui pertemuan di Wina, ke-20 pihak yang hadir saat itu bersatu untuk membuat skema perdamaian baru bagi Suriah dan menamai diri mereka sebagai *International Syria Support Group* (ISSG) dengan Amerika Serikat dan Rusia sebagai ketua nya (EEAS Press Team, 2015).

Pembahasan mengenai ISSG tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 pada tanggal 18 Desember 2015. Skema perdamaian ISSG

⁶ Lihat Bab II halaman 50.

mencanangkan mengenai transisi politik di Suriah selama enam bulan ke depan. Di dalam resolusi 2254 disebutkan:

“Acknowledges the role of the ISSG... and, within a target of six months, establishes credible, inclusive and non-sectarian governance and sets a schedule and process for drafting a new constitution, ...as set forth in the 14 November 2015 ISSG Statement;” (UNSC, 2015: 2)

Melalui resolusi 2254, Dewan Keamanan PBB juga memastikan bahwa ISSG telah sepakat untuk memerangi keberadaan organisasi teroris di Suriah. Pada akhirnya, yang tercapai hanyalah komitmen ISSG untuk memerangi organisasi teroris, sedangkan komitmen mengenai transisi politik di Suriah tidak tercapai sampai saat ini. Di dalam resolusi 2254 disebutkan:

“... to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al-Nusra Front (ANF), and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al Qaeda or ISIL, and other terrorist groups, as designated by the Security Council, and as may further be agreed by the ISSG and determined by the Security Council, ...” (UNSC, 2015: 3)

Beberapa hari setelah resolusi 2254 terbit, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2258 pada tanggal 22 Desember 2015. Resolusi tersebut berisi kekhawatiran Dewan Keamanan PBB akan banyaknya bantuan kemanusiaan yang tidak tersampaikan kepada para korban perang, bahkan tidak bisa masuk ke wilayah Suriah (UNSC, 2015: 3). Dewan Keamanan PBB mendakwa para organisasi teroris sebagai penghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Suriah. Hal di atas berkaitan dengan penjarahan besar-besaran yang dilakukan ISIS di berbagai wilayah dalam rangka membentuk negara kekhilafahan di Suriah⁷. Di dalam resolusi 2258 disebutkan:

“Expressing grave concern at all instances of hindrances to the effective delivery of humanitarian assistance, noting that ISIS (also known as Daesh),

⁷ Lihat Bab II halaman 46-50.

ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al -Qaida, are hindering the effective delivery of humanitarian assistance, ...” (UNSC, 2015: 3)

Dewan keamanan PBB masih terus mengusahakan komitmen perdamaian ISSG dengan menerbitkan resolusi nomor 2268 pada tanggal 26 Februari 2016. Resolusi tersebut mengesahkan pembentukan tim gugus tugas ISSG dengan Amerika Serikat dan Rusia sebagai pemimpinya. Gugus tersebut memiliki dua tugas, yaitu menghentikan berbagai gencatan senjata yang terjadi di Suriah dan menjadi garda dalam penyerahan bantuan kemanusiaan ke para korban perang. Di dalam resolusi 2268 disebutkan:

“Welcoming the ISSG statement of 11 February 2016, including the establishment of an ISSG humanitarian task force and an ISSG ceasefire task force, ...and demands the cessation of hostilities to begin at 00:00 (Damascus time) on 27 February 2016;” (UNSC, 2016: 1)

Namun resolusi ini pun tidak berhasil membawa Konflik Suriah menuju tahap perdamaian karena Rusia terus memutuskan untuk membantu Pemerintah Suriah dalam memperoleh kedaulatannya dan Turki memiliki kepentingan untuk memerangi YPG⁸. Komitmen ISSG yang terealisasi hanyalah komitmen untuk memerangi ISIS, Al-Qaeda, dan Jabhat Al-Nusra di Suriah.

Perhatian Dewan Keamanan PBB terhadap ISSG teralih kembali ke penggunaan senjata berbahan kimia di Suriah. Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2314 pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk memperpanjang mandat tim gabungan OPCW dan PBB dalam mencari pelaku penggunaan senjata berbahan kimia di Suriah sampai tanggal 18 November 2016. Di dalam resolusi 2314 disebutkan:

⁸ Lihat Bab II halaman 50-52.

“Reaffirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law... decides to renew the mandate of the Joint Investigative Mechanism, as set out in resolution 2235, until 18 November 2016, ...” (UNSC, 2016: 1)

Mandat tersebut diperpanjang kembali untuk satu tahun kedepan dalam resolusi nomor 2319 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2016. Di dalam resolusi 2319 disebutkan:

“Decides to renew the mandate of the Joint investigative Mechanism, as set out in resolution 2235, for a further period of one year from the date of adoption of this resolution, with a possibility of further extension and update by the Security Council if it deems necessary;” (UNSC, 2016: 1-2)

Sebelumnya, tim OPCW hanya bertugas untuk menyelidiki senjata berbahan kimia yang digunakan oleh Pemerintah Suriah. Namun melalui mandat ini, tim OPCW memiliki tugas tambahan untuk menyelidiki senjata berbahan kimia yang digunakan oleh organisasi teroris di Suriah. Di dalam resolusi 2319 disebutkan:

“Invites the Joint Investigative Mechanism to engage relevant regional States in pursuit of its mandate, including in order to identify to the greatest extent feasible any individuals, entities or groups associated with ISIL (Da’esh) or ANF... in the use of chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic...” (UNSC, 2016: 2)

Sejak Februari sampai Desember 2016, Pemerintah Suriah dan Rusia melakukan gencatan senjata di berbagai kota untuk merebut Suriah dari tangan oposisi. Gencatan senjata yang terparah terjadi di Kota Aleppo pada Desember 2016⁹. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2328 pada tanggal 19 Desember 2016 guna memberikan akses penuh kepada siapapun untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban perang di Aleppo. Di dalam resolusi 2328 disebutkan:

“... and by the fact that urgent humanitarian evacuations and assistance are now needed by a large number of Aleppo inhabitants, ... the evacuations

⁹ Lihat Bab II halaman 52-53.

of civilians must be voluntary and to final destinations of their choice ...”
(UNSC, 2016: 1)

Sebelumnya dalam resolusi 2165 (2014), Dewan Keamanan PBB telah memberikan izin kepada siapapun untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Suriah. Namun pada akhir Desember 2016 jumlah korban yang memerlukan bantuan kemanusiaan mencapai 13,5 juta orang lebih (UNSC, 2016: 1) dan pengungsi yang berasal dari Suriah telah mencapai 3 juta orang lebih (UNSC, 2016: 3), sehingga Dewan Keamanan PBB memperpanjang izin tersebut selama satu tahun ke depan melalui resolusi nomor 2332 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2016 (UNSC, 2016: 5).

Melanjutkan resolusi nomor 2328, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi nomor 2336 pada tanggal 31 Desember 2016 yang berisi harapan terhadap Iran, Rusia, dan Turki, untuk berunding dalam menghentikan gencatan senjata yang masih terjadi di Kota Aleppo. Di dalam resolusi 2336 disebutkan:

“Noting the Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, the Russian Federation and the Republic of Turkey of December 20, 2016, ... Looks forward to the meeting to be held in Astana, Kazakhstan, ...” (UNSC, 2016: 1)

Melalui resolusi nomor 2336, Iran, Rusia, dan Turki, memang mengadakan pertemuan di Astana pada Januari 2017 dan sepakat untuk secara bersama-sama melakukan de-eskalasi konflik dan meredam berbagai gencatan senjata yang terjadi di Suriah. Namun pertemuan tersebut gagal membawa Konflik Suriah menuju tahap perdamaian¹⁰.

¹⁰ Lihat Bab II halaman 53.

Usaha untuk mewujudkan kepergian ISIS dan organisasi teroris lainnya dari Suriah¹¹ meninggalkan banyak korban dan kerusakan, sehingga bantuan kemanusiaan semakin dibutuhkan di sana. Dewan Keamanan PBB membahas persoalan tersebut melalui resolusi nomor 2393 yang diterbitkan pada 19 Desember 2017. Di dalam resolusi 2393 disebutkan:

“Noting the progress made during 2017 in taking back areas of Syria from the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Daesh), and Al-Nusrah Front (ANF) but expressing its grave concern that areas remain under their control...” (UNSC, 2017: 2)

Dewan Keamanan PBB kembali memperpanjang izin untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam resolusi 2165 (2014) dan 2332 (2016) sampai satu tahun ke depan. Di dalam resolusi 2393 disebutkan:

“Decides to renew the decisions in paragraphs 2 and 3 of Security Council resolution 2165 (2014) for a further period of twelve months, that is, until 10 January 2019;” (UNSC, 2017: 4)

Akhir peran Dewan Keamanan PBB yang masuk dalam pembahasan Bab II merupakan resolusi nomor 2401 yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2018. Resolusi tersebut berisi peringatan terhadap berbagai gencatan senjata dari Pemerintah dan Turki yang masih terjadi di Suriah¹². Di dalam resolusi 2401 disebutkan:

“Reiterating its grave distress at the continued severity of the devastating humanitarian situation in Syria, including medical assistance, is now required by more than 13.1 million people in Syria, ...” (UNSC, 2018: 1)

Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB meminta seluruh pihak yang terlibat dalam area di atas untuk menghentikan kekerasan yang mereka lakukan selama minimal

¹¹ Lihat Bab II halaman 50-56.

¹² Lihat Bab II halaman 57-59.

30 hari agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke Suriah. Di dalam resolusi 2401 disebutkan:

“Demands that all parties cease hostilities without delay, for a durable humanitarian pause for at least 30 consecutive days throughout Syria, to enable the safe, unimpeded and sustained delivery of humanitarian aid, ...” (UNSC, 2018: 2)

Meski Dewan Keamanan PBB meminta untuk menghentikan gencatan senjata yang sedang terjadi, Dewan Keamanan PBB tetap mendukung pihak-pihak yang terlibat untuk tetap menggunakan kekerasan dalam memerangi ISIS. Di dalam resolusi 2401 disebutkan:

“Affirms that the cessation of hostilities shall not apply to military operations against the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al Qaeda and Al Nusra Front (ANF), ... and other terrorist groups, as designated by the Security Council;” (UNSC, 2018: 2)

Dari seluruh penjelasan di atas, secara umum Dewan Keamanan PBB telah melakukan lima upaya untuk menyelesaikan Konflik Suriah, seperti yang tertera dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1. Pengelompokan Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Suriah

Upaya	Resolusi	Tanggal	Voting
Mengenai badan pengawas untuk Konflik Suriah	2042	14 April 2012	15 setuju
	2043	21 April 2012	15 setuju
	2059	20 Juli 2012	15 setuju
Mengenai penggunaan senjata berbahan kimia	2118	27 September 2013	15 setuju
	2209	6 Maret 2015	14 setuju; 1 abstain (Venezuela)
	2235	7 Agustus 2015	15 setuju
	2314	31 Oktober 2016	15 setuju
	2319	17 November 2016	15 setuju
Mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan	2139	22 Februari 2014	15 setuju
	2165	14 Juli 2014	15 setuju
	2258	22 Desember 2015	15 setuju
	2332	21 Desember 2016	15 setuju
	2393	19 Desember 2017	12 setuju;

			3 abstain (Rusia, Tiongkok, dan Bolivia)
Mengenai penanganan gencatan senjata	2139	22 Februari 2014	15 setuju
	2328	19 Desember 2016	15 setuju
	2393	19 Desember 2017	12 setuju; 3 abstain (Rusia, Tiongkok, dan Bolivia)
	2401	24 Februari 2018	15 setuju
Mengenai imbauan untuk berdamai	2254	18 Desember 2015	15 setuju
	2268	26 Februari 2016	15 setuju
	2336	31 Desember 2016	15 setuju
Mengenai perlawanan terhadap ISIS	Disebutkan dalam resolusi tahun 2012-2018.		

Sumber: Olahan Penulis dari berbagai sumber

Meski Konflik Suriah yang dianalisis dalam Bab III merupakan linimasa dari tahun 2011-2019, namun Dewan Keamanan PBB tidak menerbitkan resolusi yang berhubungan dengan penyelesaian Konflik Suriah pada tahun 2019. Dewan Keamanan PBB memang menerbitkan resolusi nomor 2477 pada 26 Juni 2019 dan nomor 2503 pada 19 Desember 2019. Namun dua resolusi di atas membahas mengenai keberadaan *United Nations Disengagement Observer Force* (UNDOF) yang bertugas untuk mengawasi keberadaan tentara Suriah dan Israel di dataran tinggi Golan, bukan mengenai upaya penyelesaian Konflik Suriah. Ketiadaan resolusi dari Dewan Keamanan PBB terjadi bersamaan dengan Amerika Serikat yang menarik mundur pasukannya dari Suriah pada Juni 2019 lalu.¹³

¹³ Lihat Bab II halaman 60.